



# WARTA

## BPSIP JATENG

# 2024



- Kapasitas Kelembagaan  
Warsana
- Pembentukan Koperasi Petani ICARE  
Tri Cahyo Mardiyanto
- Pemberdayaan Kelompok Tani  
Iswanto dan Hartono
- Media Publikasi Penerapan Standar Mendukung Diseminasi dan Program ICARE BPSIP Jawa Tengah  
Rizqi Permata Putri dan Yuni Wulandari
- Peran Kepala Desa dalam Mendukung Korporasi Petani  
Tri Cahyo Mardiyanto dan Dedi Untung Nurhadi
- Transformasi Kelompok Wanita Tani Menjadi Korporasi Petani  
Dedi Untung Nurhadi dan Fitri Lestari
- Limbah Jerami  
Dwinta Prasetianti dan Restu Hidayah
- Efektivitas Penerapan Metode Diseminasi dalam Penguatan Korporasi  
Sri Murtiati dan Muh. Syahri Mubarak





# KAPASITAS KELEMBAGAAN TANI UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI BERKELANJUTAN

Warsana, SP. M.Si.,MP.

Padi (*Oryza sativa*) merupakan salah satu jenis tanaman pangan paling penting di dunia. Meskipun produksi padi dunia berada pada urutan ketiga setelah jagung dan gandum, namun padi merupakan makanan pokok sumber karbohidrat utama bagi sebagian besar penduduk dunia. Di Indonesia sendiri padi menempati urutan pertama sebagai bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu berbagai upaya peningkatan produksi terus dilakukan. Namun sayangnya sampai saat ini produksi padi nasional belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat kita, dengan kata lain Indonesia belum mampu berswasembada padi. Sebagai negara agraris dengan lahan sawah yang luas, semestinya produksi padi di Indonesia melimpah. Minimal untuk kebutuhan didalam negeri. Namun kenyataannya sangat ironis, kita sampai sekarang masih mengimpor beras (BPS, 2018). Bahkan Pada tahun 2023, Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia yang mengimpor beras, dengan 3,5 juta metrik ton. Filipina berada di urutan pertama dengan 3,9 juta metrik ton. Berikutnya adalah China dengan 2,6 juta metrik ton, Uni Eropa dengan 2,25 juta metrik ton, Nigeria dengan 2 juta metrik ton, Irak dengan 1,85 juta metrik ton, Vietnam dengan 1,8 juta metrik ton, Arab Saudi dengan 1,5 juta metrik ton, Amerika Serikat dengan 1,36 juta metrik ton, dan Malaysia dengan 1,35 juta metrik ton. Menurut Akbar dan Anisa (2024) menyatakan bahwa pada bulan Maret 2024, Indonesia mengimpor 567,22 ribu ton beras, yang senilai USD371,60 juta. Ini merupakan kenaikan 29,29 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023, ketika Indonesia mengimpor 511,90 ribu ton. Pada bulan Maret 2024, mayoritas beras yang diimpor Indonesia berasal dari Vietnam (286,26 ribu ton), Thailand (142,65 ribu ton), Myanmar (76,61 ribu ton), Pakistan (61,57 ribu ton), dan India (100 ton).

Kementerian Pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan konsumsi beras telah berupaya melalui berbagai program untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas padi baik berupa bantuan benih, alsintan, sarana prasarana, pelatihan, dan pendampingan kelembagaan. Petani merupakan pelaksana utama dalam upaya meningkatkan produktivitas padi. Petani tidak bisa berjalan sendiri, dibutuhkan sebuah kelembagaan petani. Kelembagaan petani memiliki peran penting dalam mensukseskan program pemerintah. Beberapa bentuk kelembagaan petani yang berperan dalam mensukseskan program pertanian antara lain: Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian, Dewan Komoditas Pertanian Nasional, P4S (Program Peningkatan Kapasitas Petani). Peran kelembagaan petani dalam mensukseskan program pertanian antara lain berperan dalam memaksimalkan bantuan yang telah diberikan, melanjutkan apa yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga program dapat berkelanjutan, dan sebagai saluran distribusi informasi yang efisien sehingga melalui kelembagaan petani ini dapat meningkatkan kapasitas petani, memperluas akses petani ke pasar, membantu petani dalam melakukan pemasaran bersama, membantu petani dalam melakukan negosiasi harga yang lebih baik dan pada akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani.



Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan dukungan kapasitas kelembagaan tani. Kebijakan dan teknologi pertanian (termasuk pengembangan padi) hanya akan efektif, jika dan hanya jika dikelola oleh suatu kelembagaan tani yang baik. Pengembangan kelembagaan tani menjadi penting, karena petani merupakan penerap dan sasaran utama implementasi teknologi. Petani jika berusahatani secara individu terus berada di pihak yang lemah karena petani secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan terpecah serta kepemilikan modal yang rendah. Sehingga, dengan berkelompok maka petani tersebut akan lebih kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun permodalannya.

Kelembagaan petani desa umumnya belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan partisipasi dan kekompakan anggota kelompok masih relatif rendah; pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu; pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis social capital; kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan horizontal dan bukan ikatan vertikal (Zuraida&Rizal, 1993; Agustian et al., 2003; Syahyuti, 2007; Purwanto et al., 2007). Menurut Purwanto, et al (2007), kelembagaan petani masih belum seperti apa yang diharapkan, salah satu penyebabnya adalah kurang-pedulian terhadap pentingnya menemukan celah masuk (entry-point) kelembagaan, sehingga menimbulkan kebingungan dalam rekayasa kelembagaan yang sesuai dengan tujuan produksi pertanian. Kondisi tersebut diperparah dengan upaya mengejar waktu agar suatu program dapat menunjukkan hasil dalam waktu singkat.

Upaya pengembangan kelembagaan tani seharusnya tidak hanya menyentuh persoalan biofisik dan ekonomi, tetapi lebih ditekankan pada persoalan kelembagaan yang mengatur dan menjamin keberlanjutan kelembagaan kelompok tani serta membutuhkan waktu yang lama (Syahyuti, 2007). Tulisan ini merupakan review dari berbagai sumber pustaka dan pengalaman lapang yang menguraikan tentang kapasitas kelembagaan tani untuk mendukung peningkatan produktivitas padi berkelanjutan.





## PENGERTIAN KELEMBAGAAN TANI



Kelembagaan adalah suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang dan lembaga untuk tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Dengan kata lain Kelembagaan Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Kelembagaan dapat berbentuk sebuah relasi sosial yang melembaga (non formal institution), atau dapat juga berupa lembaga dengan struktur dan badan hukum (formal institution). Lembaga adalah bentuk kelembagaan formal, yang memiliki struktur tegas dan diformalkan (Kementan, 2013). Kelembagaan mengandung dua aspek yakni "aspek kultural" dan "aspek struktural". Aspek kultural terdiri dari hal-hal abstrak yang menentukan "jiwa" suatu kelembagaan yaitu nilai, norma, dan aturan, kepercayaan, moral, ide, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, dan orientasi. Sementara, aspek struktural lebih statis, yang berisi struktur, peran, hubungan antar peran, integrasi antar bagian, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur riil, struktur kewenangan, hubungan kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas, keanggotaan, klik, profil, pola kekuasaan, dan lain-lain. Kedua aspek ini secara bersama-sama membentuk dan menentukan perilaku seluruh orang dalam kelembagaan tersebut. Keduanya, merupakan komponen pokok yang selalu eksis dalam setiap kelompok sosial, dan berfungsi ibarat dua sisi mata uang.

Menurut Mardikanto (1993) pengertian kelembagaan tani adalah sekumpulan petani yang terdiri dari petani dewasa (pria/wanita) maupun petani-taruna yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan dipimpin oleh seorang kontak tani. Sedangkan kelembagaan tani sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 273 /Kpts /OT.160 /4 / 2007, adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.



## PRINSIP INOVASI KELEMBAGAAN TANI

Inovasi kelembagaan tani dilaksanakan dengan mengacu pada sepuluh prinsip dasar (Departemen Pertanian, 2007), sebagai berikut: (1) Bertolak atas kenyataan yang ada (existing condition), tiap masyarakat memiliki sejarahnya sendiri, sehingga kondisi yang ada harus menjadi dasar pengembangan, (2) Kebutuhan, masyarakat memang sungguh-sungguh membutuhkan adanya kelompok tani, (3) Berpikir dalam kesisteman, parsial dan temporal, (4) Partisipatif, seluruh keputusan dan aksi haruslah merupakan kesepakatan semua pihak, (5) Efektifitas, kelembagaan tani hanyalah alat, bukan tujuan sehingga berpikirlah pada hasil akhir, (6) Efisiensi, kelembagaan tani yang terbentuk akan menjadikan semua kegiatan menjadi lebih murah, lebih mudah, dan lebih sederhana baik secara keseluruhan maupun secara bagian per bagian, (7) Fleksibilitas, kelembagaan yang dibentuk harus sesuai dengan sumberdaya yang ada, kondisi yang dihadapi, keinginan, dan kebutuhan petani, (8) Orientasi pada nilai tambah atau keuntungan bagi seluruh anggota, (9) Desentralisasi, setiap komponen dalam kelembagaan tani harus mampu beroperasi dengan kewenangan cukup, sehingga kreatifitasnya dapat berkembang optimal. (10) Keberlanjutan, harus mampu membangun kekuatannya sendiri dan tetap mampu beroperasi, meskipun input atau dukungan dari luar berkurang.

Menurut Akhmad (2017), upaya yang harus dilakukan petani untuk menaikkan posisi tawar petani adalah sebagai berikut: (1) Konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran, (2) Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif, (3) Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar petani dalam perdagangan produk pertanian.

Kelembagaan tani dibentuk untuk memenuhi kebutuhan sosial anggotanya. Sifatnya tidak linier, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya, berupa: kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hubungan sosial, pengakuan, dan pengembangan pengakuan (Elizabeth&Darwis, 2003). Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu kelembagaan petani agar tetap eksis dan berkelanjutan adalah:

- Prinsip Otonomi

Pengertian prinsip otonomi dapat dibagi ke dalam dua bentuk yaitu otonomi individu dan otonomi desa. Otonomi individu adalah situasi yang memungkinkan individu dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam dirinya secara optimal. Otonomi desa adalah penyesuaian kelembagaan tani dengan tatanan hidup di desa dan lingkungan sumberdaya alam (Syahyuti, 2007).

- Prinsip Pemberdayaan

Pada proses pemberdayaan yang perlu menjadi perhatian adalah tidak hanya terfokus pada internal (horizontal) tetapi juga eksternal (vertikal), utamanya tata hubungan kelembagaan dengan mitra (Saptana, et al, 2003; Elizabeth, 2007).

- Prinsip Kemandirian Lokal

Semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara desentralisasi. Upaya pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi otonom yang menjamin setiap komponen akan tetap eksis. Kemandirian lokal mensyaratkan pengelolaan yang lebih mengedepankan partisipasi dan komunikasi (Amien, 2005).



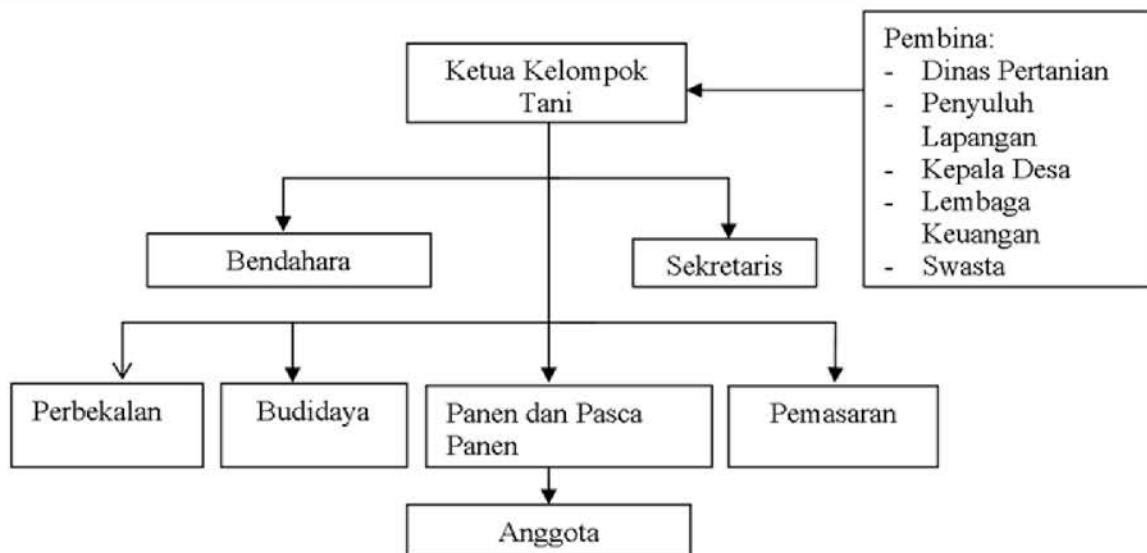
## TAHAPAN INOVASI KELEMBAGAAN TANI

### - Membangun Kelembagaan Tani

Membangun kelembagaan baru berdasarkan kelembagaan yang sudah ada dengan memperhatikan: a). Tidak merubah struktur, posisi, dan peran para tokohnya; b). Pendekatan dengan pola partisipatif; c). Selalu melibatkan ketokohan institusi bersangkutan; dan d). Penyusunan modelnya berlandaskan pertimbangan ilmiah dan praktis sesuai situasi, kondisi, dan penyaluran para petugas di lapangan.

### - Membentuk Struktur Organisasi

Pembentukan struktur organisasi perlu mempertimbangkan tiga komponen, yaitu: kompleksitas, formalitas, dan sentralitas. Tingkat kompleksitas berkaitan dengan berapa banyak jumlah aktifitas-aktifitas yang berbeda dalam organisasi yang diperlukan, secara horizontal (berdasarkan fungsi-fungsi), vertikal (level hirarkhi), dan spatial (hubungan antar bagian secara lokasi). Tingkat formalitas berkaitan dengan jumlah pekerjaan yang dispesialisasikan. Derajat sentralitas berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dikonsentrasikan. Terkait dengan struktur organisasi kelompok tani tersaji pada gambar berikut :





Kepengurusan kelompok tani perlu dikelola oleh sumberdaya manusia yang berpengalaman dibidang usahatani padi baik budidaya, pasca panen, maupun pemasaran (Kasriani, 2018). Beberapa kriteria yang dipersyaratkan, diantaranya (1) Minimal berpendidikan SLTA,; (2) Mempunyai pengalaman dibidang usahatani padi minimal 3 tahun; (3) Diprioritaskan personil dari desa setempat; (4) Berkepribadian baik, beriman, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian terhadap ekonomi desa.

- Merekrut Anggota

Perekrutan anggota dilakukan secara partisipatif dan selektif. Anggota memang benar-benar membutuhkan wadah kelompok tani dalam kaitannya untuk meningkatkan usahatani padi yang dikelolanya. Memahami sepenuhnya bahwa dengan menjadi anggota kelompok tani akan lebih efisien, dan ekonomis dibanding bila usahatani tersebut dilakukan secara individu.

- Menyusun Road Map Usahatani

Usahatani padi yang disusun tanpa perencanaan yang matang, berarti sama saja sedang merencanakan kegagalan. Perencanaan usaha adalah suatu dokumen tertulis yang menguraikan semua rencana berkenaan dengan usaha yang akan dilakukan secara detail dan merupakan suatu cetak biru (blue print) yang realitis dan logis. Langkah awal dalam mempersiapkan perencanaan usaha sebaiknya dapat menjawab lima pertanyaan penting, yaitu: (1) Apa yang dimiliki (kekuatan dan kelemahan), (2) K arah mana usaha yang akan dilakukan, (3) Bagaimana cara mendapatkan dan memastikan kesuksesan yang ingin diraih, dan (4) Rintang apa yang akan dihadapi





## ARTI PENTING KELEMBAGAAN PETANI

Menurut Anantanyu (2009), kelembagaan petani dibentuk pada dasarnya mempunyai beberapa peran, yaitu: (a) tugas dalam organisasi (interorganizational task) untuk memediasi masyarakat dan negara, (b) tugas sumberdaya (resource tasks) mencakup mobilisasi sumberdaya lokal (tenaga kerja, modal, material, informasi) dan pengelolaannya dalam pencapaian tujuan masyarakat, (c) tugas pelayanan (service tasks) mungkin mencakup permintaan pelayanan yang menggambarkan tujuan pembangunan atau koordinasi permintaan masyarakat lokal, dan (d) tugas antar organisasi (extra-organizational task) memerlukan adanya permintaan lokal terhadap birokrasi atau organisasi luar masyarakat terhadap campur tangan oleh agen-agen luar.

Arti penting keberadaan kelembagaan petani didasarkan atas kerjasama yang dapat dilakukan oleh petani dalam mengelola sumberdaya pertanian, antara lain: (a) pemrosesan (processing), agar lebih cepat, efisien dan murah; (b) pemasaran (marketing), akan meyakinkan pembeli atas kualitas dan meningkatkan posisi tawar petani; (c) pembelian (buying), agar mendapatkan harga lebih murah; (d) pemakaian alat-alat pertanian (machine sharing), akan menurunkan biaya atas pembelian alat tersebut; (e) kerja sama pelayanan (co-operative services), untuk menyediakan pelayanan untuk kepentingan bersama sehingga meningkatkan kesejahteraan anggota; (f) bank kerja sama (co-operative bank); (g) kerja sama usahatani (co-operative farming), akan diperoleh keuntungan lebih tinggi dan keseragaman produk yang dihasilkan; dan (h) kerja sama multi-tujuan (multi-purpose co-operatives), yang dikembangkan sesuai minat yang sama dari petani.





## PENUTUP

Keberadaan kelembagaan petani bagi petani sudah menjadi keniscayaan untuk memperbaiki taraf hidup, harkat dan martabatnya. Kelembagaan petani harus ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan harapan, keinginan, dan pemenuhan kebutuhan petani. Kelembagaan petani yang efektif diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kemandirian dan martabat petani. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian perlu dirancang dengan memberikan muatan (content area) pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan petani. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan, terutama pemerintah ada beberapa komponen antara lain: (a) meningkatkan kapasitas para penyuluh lapangan, (b) menggunakan cara-cara atau pendekatan partisipatif yang berorientasi pada kebutuhan petani dalam melakukan kegiatan penyuluhan, dan (c) memperkuat kelembagaan penyuluhan. Apabila komponen tersebut berjalan dengan baik, maka para Penyuluh Pertanian sebagai garda terdepan dalam pembangunan pertanian bisa melakukan pendampingan secara optimal kepada para petani yang tergabung dalam kelembagaan tani. Melalui pendampingan yang tertata dari para Penyuluh Pertanian diharapkan para petani di lapang dapat berkontribusi langsung guna mendukung dan mewujudkan peningkatan produktivitas padi secara berkelanjutan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, A., Supena F., Syahyuti, dan E. Ariningsih. 2003. Studi Baseline Program PHT Perkebunan Rakyat Lada di Bangka Belitung dan Lampung. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bogor.
- Amien, Mappadjantji. 2005. Kemandirian Lokal “Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru”. PT. Gramedia, Jakarta
- Anantanyu, S. 2009. Partisipasi Petani dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Disertasi pada Institut Pertanian Bogor.
- Akhmad, Ali. 2017. “Pertumbuhan Sektor Ritel 2017 Lebih Rendah dibanding 2016”. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/aprindo-pertumbuhan-sektor-ritel-2017-lebih-rendah-dari-2016-1157436>
- Akbar, R.J dan Anisa Aulia. 2024. “RI Sudah Impor 567,22 Ribu Ton Beras Maret 2024, Naik 921,51 Persen”. Diakses tanggal 17 Oktober 2024. <https://www.viva.co.id/bisnis/1707491-ri-sudah-impor-567-22-ribu-ton-beras-maret-2024-naik-921-51-persen>
- BPS. “Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Beras di Indonesia” 2018. Diakses pada tanggal 01 Mei 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/05/06/69834d72f7ef1c32eee5c4b6/executive-summary-of-paddy-harvested-area-and-production-in-indonesia-2023--final-figures-.html>.
- Departemen Pertanian. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pertumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani. Jakarta.
- Elizabeth, R., dan V. Darwis. 2003. Karakteristik Petani Miskin dan Persepsinya terhadap Program JPS di Jawa Timur. SOCA, Bali.
- Esman, Milton J. 1986. “Unsur-unsur dari Pembangunan Lembaga” dalam Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: dari Konsep ke Aplikasi. Editor J.W. Eaton. UI Press. Jakarta. Hal 21 – 46.
- Kasriani. 2018. Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Padi. Universitas Hasanudin
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT/160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Mardikanto, Totok. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Surakarta : UNS Press. 211 hal.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2027. Peraturan Menteri Pertanian No.273/Kpts/OT.160/4/2007, Tentang Kelompok Tani Adalah Kumpulan Petani/Peternak/ Pekebun Yang Dibentuk Atas Dasar Kesamaan Kepentingan, Kesamaan Kondisi, Lingkungan (Sosial, Ekonomi, Sumber Daya) Dan Keakraban Untuk Meningkatkan Dan Mengembangkan Usaha Anggota. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Purwanto. 2007. Penguatan Kelembagaan Petani Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Malang.



- Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 5 no. 1. Maret.
- Saptana dan Ashari. 2007. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Kemitraan Usaha. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(24). Bogor. Hal 123- 130.
- Zuraida, Desiree dan J. Rizal (ed). 1993. Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan: Pokok-pokok Pemikiran Selo Soemardjan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

# PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI BERBASIS KORPORASI

(Pembentukan Koperasi Petani Program ICARE di Jawa Tengah)

Tri Cahyo Mardiyanto

Korporasi di kawasan pertanian adalah bisnis yang beroperasi dalam sektor pertanian atau industri makanan dan minuman dengan status hukum perusahaan atau korporasi. Korporasi pertanian dapat mencakup berbagai jenis kegiatan pertanian yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Pembentukan kelembagaan ekonomi petani berbasis korporasi dengan dibentuknya 3 koperasi petani di 3 desa di lokasi program ICARE diharapkan dapat menggerakkan perekonomian dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat/koperasi tani tersebut khususnya.

Indonesia adalah negara agraris namun jumlah petani dengan luas lahan dan skala usaha yang kecil, hampir tidak mungkin dapat mengorganisasikan dirinya sendiri secara efektif dan efisien. Kondisi ini menyebabkan petani cenderung bekerja sendiri-sendiri sehingga biaya transaksi menjadi lebih besar per satuan nilai output yang dihasilkan (Anantanyu, 2009). Pembangunan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani telah dilakukan melalui penerapan inovasi teknologi dan inovasi sosial, salah satunya adalah inovasi kelembagaan yang merupakan faktor penting dalam pembangunan pertanian. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani diarahkan untuk membentuk korporasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan, kultur petani dan potensi wilayah serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inovasi kelembagaan korporasi petani yang berorientasi kepada kesejahteraan petani merupakan salah satu faktor penting dalam membangun pertanian (Mardikanto, 2010).

Seiring dengan hal tersebut Kementerian Pertanian menindaklanjuti kawasan pertanian berbasis korporasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 18 tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, yang menyebutkan bahwa korporasi petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan kepada petani. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan pertanian. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan



hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani. Dalam bentuk korporasi petani skala ekonomi usaha meningkat oleh karena dalam pembentukannya diperlukan berbagai sumber daya pertanian antara lain permodalan, SDM, infrastruktur dan bimbingan peningkatan kemampuan teknis, bisnis, dan organisasi.

### **Program Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment (ICARE)**

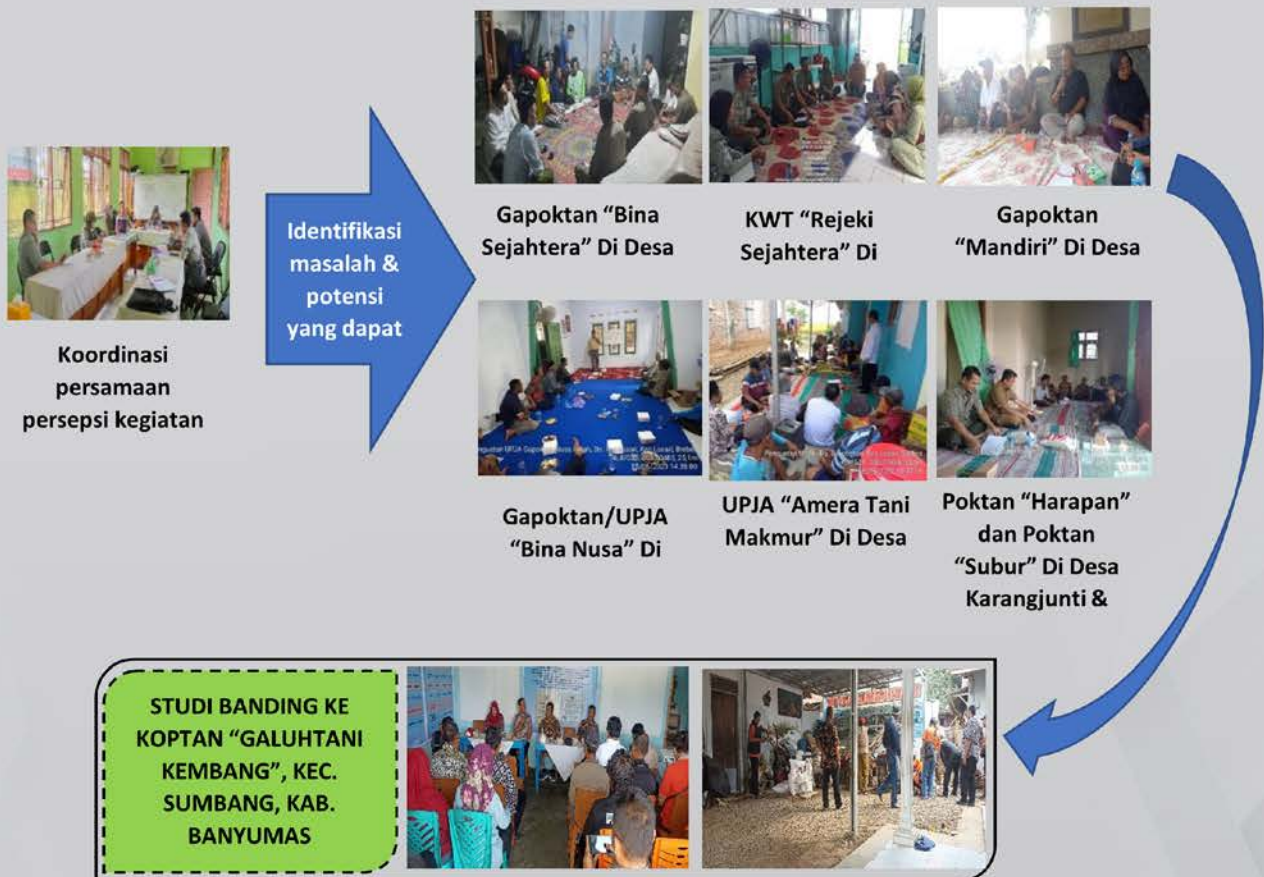
Program Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment (ICARE) merupakan program Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur/fasilitas, peningkatan produktivitas, efisiensi penggunaan input dan efisiensi usahatani sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Selain itu, program ini juga untuk meningkatkan layanan dan akses teknologi informasi. Diharapkan program ini bisa menghasilkan keberlanjutan sistem produksi, dan peningkatan kawasan pertanian berbasis korporasi dan inovasi. Disamping itu untuk mendukung pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian yang berkelanjutan dan inklusif. Lokasi Program ICARE di Provinsi Jawa Tengah berada di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dengan salah satu targetnya adalah pembentukan korporasi padi dan pisang hal, ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2021 yang mengamanatkan Kementerian Pertanian untuk melaksanakan program pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan beras premium (Kementan, 2022).

Poktan “Harpan” dan Poktan “Subur” Di Desa Karangjunti & Desa Dukuhsalam Sebagai langkah awal, dilakukan pertemuan koordinasi sekaligus sosialisasi kegiatan Program ICARE khususnya dalam rangka mendukung pembentukan korporasi petani melalui penguatan kelembagaan petani antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, BPP dan BPSIP Jawa Tengah. Melalui Program ICARE, pengembangan poktan dan gapoktan diarahkan pada : (i). Penguatan poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri, yaitu dengan adanya pertemuan rutin, aturan, organisasi yang rapi, kegiatan dari hulu sampai hilir, kerjasama dengan pihak luar, dan pengumpulan modal untuk usaha bersama; (ii). Peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis secara partisipatif dan kreatif dalam hal : identifikasi kebutuhan, permasalahan dan pemecahannya dengan memanfaatkan peluang SDA, SDM dan potensi pasar serta mengembangkan teknologi spesifik lokasi; dan (iii). Peningkatan kemampuan poktan dalam menjalankan fungsinya sebagai unit produksi, unit usaha, dan unit kerjasama sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis.





Salah satu kegiatan untuk mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi petani di wilayah terpilih Program ICARE, dilaksanakan studi banding ke Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Koperasi Pertanian (Koptan) “Galuhani Kembang” yang berlokasi di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Tujuan dari studi banding ini agar calon pengurus dan anggota koperasi petani yang akan dibentuk dapat lebih memahami manajemen dan usaha yang dapat dikelola koperasi pertanian sehingga penumbuhan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi petani di wilayah Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dapat terwujud.



Gambar 1. Proses Penguatan Kelembagaan Petani dalam mendukung terwujudnya Kelembagaan Eonomi Petani (KEP) Berbasis Korporasi di Kec. Losari, Kab. Brebes, Jawa Tengah

Dalam menginisiasi kelembagaan petani berbasis korporasi, agar dapat berjalan dengan baik, perlu mengkaji potensi yang dalam kelembagaan petani untuk menjadi dasar pengembangan korporasi petani, yaitu : (i). Melihat sistem agribisnis yang sudah berjalan yang akan dijadikan unit usaha korporasi petani,



misalnya pelayanan jasa alsintan, penyediaan saprodi, penyerapan hasil panen komoditas, pengolahan hasil, dan pemasaran. Sebagai korporasi yang berbadan hukum, petani sebagai pelaku usaha harus dapat melihat peluang pasar, sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif dengan volume yang besar sehingga mampu menghasilkan nilai tambah bagi petani yang terlibat; (ii). Melihat potensi sumber daya manusia yang memiliki kemauan dan kemampuan yang tinggi untuk berjuang dan berkompeten dalam pengelolaan korporasi petani, terutama pelibatan petani milenial dan wanita tani; dan (iii). Mengingat korporasi petani memerlukan wilayah/hamparan yang luas dalam pengembangan 1 atau lebih komoditas pertanian (sesuai Permentan No. 18 Tahun 2018), maka perlu mensinergiskan kegiatan korporasi yang akan dibentuk dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah minimal dukungan dari tingkat desa/kelurahan. Jika digambarkan konsep transformasi kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi berbasis korporasi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. Konsep Transformasi Kelembagaan Petani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Berbasis Korporasi

Kelembagaan petani yang efektif ini diharapkan mampu mendukung pembangunan pertanian. Ditingkat petani lembaga diperlukan sebagai: (a) wahana untuk pendidikan, (b) kegiatan komersial dan organisasi sumberdaya pertanian, (c) pengelolaan properti umum, (d) membela kepentingan kolektif, dan (e) lain-lain. Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana yang dimaksudkan sebagai sarana pendorong proses perubahan dan inovasi. Proses transformasi kelembagaan pada petani melalui pembanguan atau pengembangan kelembagaan seyogyanya dapat menjadikan kelembagaan



menjadi bagian penting dalam kehidupan petani untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan usahatani (Syahyuti, 2003). Hermanto dan Swastika (2011) menambahkan bahwa penguatan kelompok tani masih sangat perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain; (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitas dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha tani, serta (3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota.

Kegiatan inisiasi kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani berbasis korporasi lebih terfokus kepada 3 (tiga) Desa wilayah terpilih yaitu Desa Kalibuntu, Desa Kedungneng, dan Desa Bojongsari, Kecamatan Losari. Penentuan Desa wilayah terpilih tersebut, berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana tersaji pada tabel 1.

No	Kondisi	Desa Kalibuntu	Desa Kedungneng	Desa Bojongsari
1	Komitmen Petani (Pendiri Koptan)	12 orang	15 orang	15 orang
2	Unit Usaha yang akan dikembangkan	Penyediaan saprodi, penyerapan hasil panen, Jasa alsintan, dan pemasaran	Jasa alsintan, pengolahan hasil, penyerapan hasil panen, dan pemasaran	Jasa alsintan, penyediaan saprodi (benih padi)
3	Komitmen pengumpulan modal bersama	Ada	Ada	Ada
4	Dukungan Pemerintah Desa	Ada	Ada	Ada
5	Komoditas	Padi dan Pisang	Padi dan Pisang	Padi
6	SDM yang terlibat	Pria, wanita dan muda	Pria, wanita dan muda	Pria, wanita dan muda

Sumber : Data Primer (2023)

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa komoditas yang dominan berkembang adalah padi dan pisang. Dari kedua komoditas ini, kedepan akan dikelola secara intensif agar dapat menggerakkan perekonomian desa tersebut.

Pada proses pembentukan korporasi atau dalam memfasilitasi pendirian Korporasi Petani, program akan melihat dan menyesuaikan bentuk korporasi yang akan dibentuk yaitu bentuk koperasi atau PT. Pemilihan kesesuaian bentuk korporasi petani ini akan melihat dari 3 aspek yaitu : (i). Aspek teknis, menjadi pertimbangan dalam merancang aktivitas sehingga bisnis dapat dijalankan dengan baik. Misalnya ketersediaan bahan baku, penerapan teknologi, lokasi, dan kebutuhan sarana prasarana; (ii).



Aspek finansial, terkait dengan keuntungan yang akan didapat, yang berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis atau usaha; dan (iii). Aspek manajerial, terkait dengan jenis usaha yang akan dijalankan termasuk SDM yang akan menjalankan usaha tersebut. Selain dari 3 aspek tersebut, kesesuaian pemilihan bentuk korporasi juga melihat dari aspek kondisi masyarakat sosial ekonomi petani yaitu terkait dengan kemudahan pembentukan, jumlah permodalan yang dapat dihimpun, dan semangat gotong royong terkait kesepakatan dari petani itu sendiri. Dalam pembentukan korporasi petani juga akan melibatkan beberapa stakeholder terkait, misalnya jika dalam bentuk koperasi petani, program akan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi dan pencatatan koperasi yang akan dibentuk. Selain itu, terkait dengan penerbitan nomor registrasi menjadi koperasi yang berbadan hukum akan bekerjasama dengan profesi jasa di bidang hukum yaitu notaris.

Berikut desa wilayah terpilih yang telah melaksanakan pembentukan korporasi petani dalam bentuk koperasi petani berbadan hukum berdasarkan pertimbangan dari 3 (tiga) aspek, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Dasar pertimbangan pembentukan koperasi petani di wilayah terpilih

No	Aspek Pertimbangan	Desa Kalibuntu	Desa Kedungneng	Desa Bojongsari
1	Teknis : a. Bahan Baku : - Padi - Pisang  b. Saprodi : - Pupuk dan obat-obatan - Traktor tangan, Combine Harvester, Transplanter	Unit usaha penyerapan hasil panen dan RMU Unit usaha penyediaan benih pisang  Unit usaha penyedia saprodi Unit usaha jasa alsintan	Unit usaha penyerapan hasil panen Unit pengolahan pisang  Unit usaha penyedia saprodi  Unit usaha jasa alsintan	Unit Usaha Penyediaan Benih Semai Kering   Unit usaha penyedia saprodi Unit usaha jasa alsintan
2	Finansial	Penyertaan modal untuk berjalannya koptan dan diharapkan mendapatkan keuntungan berupa SHU dan mendapat prioritas mendapat fasilitas dari Koptan	Penyertaan modal untuk berjalannya koptan dan diharapkan mendapatkan keuntungan berupa SHU dan mendapat prioritas mendapat fasilitas dari Koptan	Penyertaan modal untuk berjalannya koptan dan diharapkan mendapatkan keuntungan berupa SHU dan mendapat prioritas mendapat fasilitas dari Koptan
3	Manajerial	Setiap unit usaha telah ditunjuk seorang manager untuk mengelola	Setiap unit usaha telah ditunjuk seorang manager untuk mengelola	Setiap unit usaha telah ditunjuk seorang manager untuk mengelola

Sumber : Data Primer (2023)



Pada proses pembentukan korporasi petani melalui kegiatan penguatan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani berbasis korporasi dalam bentuk koperasi petani yang dilakukan program ICARE di Jawa Tengah adalah :

1. Identifikasi permasalahan dan potensi yang ada yang dapat dikembangkan untuk mengarah kepada pembentukan kelembagaan ekonomi petani berbasis korporasi yang berbadan hukum. Dalam tahapan ini diharapkan adanya perubahan dalam petani antara lain :
  - a. Membangun mindset (menyadarkan) petani bahwa melalui kelembagaan ekonomi petani, dapat menguatkan posisi tawar petani dalam pemasaran. Kelembagaan yang dibantu adalah dari petani, untuk petani dan oleh petani, bukan milik pengurus;
  - b. Adanya dukungan dan partisipasi dari semua pihak, mulai petani (selaku pelaku), poktan, gapotan, pemerintah desa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, BPSIP Jawa Tengah, dan stakeholder terkait lainnya.
  - c. Dalam proses pembentukan koperasi petani tersebut, dihimbau komposisi pengurus maupun anggota melibatkan petani muda dan wanita tani sebagai bagian dari agenda pemberdayaan petani muda dan wanita tani.
  - d. Korporasi yang akan dibentuk juga dapat menentukan titik awal jenis usaha yang akan dikembangkan terlebih dahulu sebelum berkembang ke jenis usaha lainnya.
2. Pertemuan dalam rangka penentuan SDM yang berkompeten dan mau berjuang dalam proses pembentukan koperasi, hasilnya sebagai calon pendiri koptan (paling tidak 15 sampai 20 orang)
3. Pertemuan dengan pendiri koperasi petani (koptan) dalam menentukan : (i). Pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara; (ii). Pengawas yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota; (iii). Manager/pengelola unit usaha (jika memungkinkan); dan (iv). Susunan pengurus, pengawas dan manager unit usaha dengan melibatkan petani muda dan wanita tani.



4. Rembug Gapoktan perihal rencana pembentukan koptan berdasarkan hasil pertemuan dengan pendiri koptan.
5. Pendampingan konsultasi ke Dinas Koperasi terkait syarat dan kelengkapan dokumen untuk pembentukan koperasi.
6. Pendampingan penyusunan konsep AD/ART, kelengkapan dokumen, nama Koptan (paling tidak menyiapkan 3 calon nama koptan, masing-masing nama 3 suku kata, terkait menghindari nama koptan yang sama, yang sudah terdaftar lebih dulu di Kemenkumham). Adapun dokumen yang disiapkan adalah : (i). Surat permohonan pendirian akte koperasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Brebes; (ii). Berita Acara Pendirian Koperasi yang disaksikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Brebes; (iii). Surat Keterangan Bukti Penerimaan Modal dan Bukti Penyetoran Modal; (iv). Daftar Nama Pendiri dan Daftar Kehadiran Rapat Pendirian Koperasi; (v). Neraca Awal; (vi). Susunan Pengurus dan Pengawas; (vii). Rencana Awal Kegiatan; (viii). Biodata Pengelola/Manajer Unit Usaha dan Susunan Anggota Unit Usaha; (ix). Daftar Sarana Kerja; dan (x). Surat Kuasa penandatanganan AD/ART dari Pendiri kepada Pengurus Koptan
7. Penyuluhan Perkoperasian dengan narasumber dari Dinas Koperasi.
8. Finalisasi kelengkapan dokumen untuk syarat pendaftaran Koptan ke notaris.
9. Pendaftaran koptan ke notaris untuk menjadi koptan berbadan hukum.
10. Pengukuhan/sosialisasi/launching koptan yang telah terbentuk.
11. Menyusun rencana tindak lanjut kegiatan koptan, terkait jenis usaha, analisa usaha, dan lain-lain.





Gambar 3. Proses Inisiasi Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Berbentuk Koperasi Petani di Kec. Losari, Kab. Brebes

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada dan tahapan yang telah dilakukan dalam rangka pembentukan korporasi petani, pada tahun 2023 dan 2024 telah terbentuk koperasi petani yang berbadan hukum di 3 Desa wilayah terpilih, yaitu ;

1. Koperasi Petani “Tumbuh Gelimang Pangan” Desa Kalibuntu, dengan nomor akta pendirian : AHU-0003287.AH.01.29.Tahun 2023 tanggal 11 Agustus 2023.
2. Koperasi Petani “Langgeng Lumbung Pangan Kedengneng” Desa Kedungneng dengan nomor aktan pendirian : AHU-0005273.AH.01.29.Tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023.
3. Koperasi Petani “Sinergi Hasil Tani” Desa Bojongsari dengan nomor aktan pendirian : AHU-0001074.AH.01.29.Tahun 2024 tanggal 02 April 2024

Kriteria kelembagaan korporasi petani yang perlu ditumbuhkembangkan dalam pengembangan kawasan pertanian adalah : (1) Kelembagaan berorientasi bisnis dan mampu me-leverage modal untuk menciptakan nilai tambah; (2) Kelembagaan harus mampu mengelola sarana produksi secara enam tepat (waktu, lokasi, dosis, jenis, mutu, dan harga), dan menyangga harga produk; (3) Kelembagaan harus mampu mengorganisir dan menggerakkan petani untuk menerapkan inovasi teknologi; dan (4) Kelembagaan harus mampu melakukan edukasi kepada petani untuk mengembangkan kawasan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.



Proses pembentukan korporasi petani dilakukan melalui konsolidasi kelembagaan petani, dimulai dari petani yang dikonsolidasikan ke dalam suatu Poktan, kemudian Poktan dikonsolidasikan ke dalam Gapoktan. Dari beberapa Gapoktan yang tergabung dalam suatu klaster selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Gapoktan Bersama. Gapoktan Bersama dibentuk dari, oleh, dan untuk petani melalui konsolidasi Gapoktan yang ada di setiap kawasan

Konsep kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani dalam bentuk poktan dan gapoktan. Kelompok tani (poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Gabungan kelompok tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani (poktan) yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha (Permentan No 67 Tahun 2016).

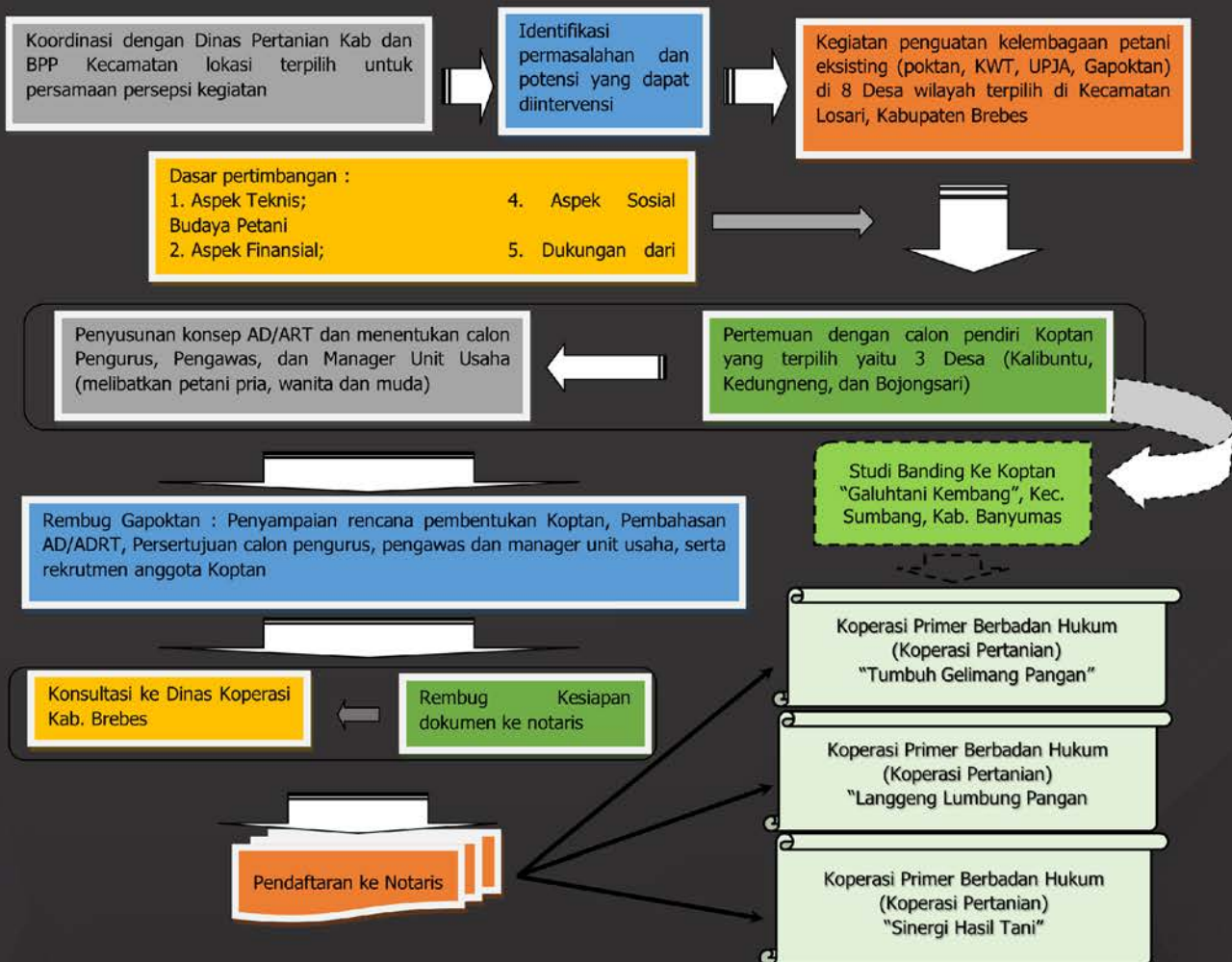
Ilustrasi proses penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berbasis korporasi (Koperasi Petani) dapat dicermati pada gambar 4.



Gambar 4. Proses Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Berbasis Korporasi (Koperasi Petani)



Berdasarkan uraian di atas, dalam penguatan kelembagaan petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi petani yang berbasis korporasi dan berbadan hukum di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, tahapannya dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 5. Pola Penguatan Kelembagaan Petani Berbasis Korporasi di Kec. Losari, Kab. Brebes

Dalam rangka penguatan kelembagaan petani menjadi KEP berbasis korporasi di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes melalui program ICARE dapat dikatakan berhasil, hal ini terbukti telah terbentuknya Koperasi Petani di 3 (tiga) desa yaitu Koperasi Petani (Koptan) Tumbuh Gelimang Pangan Desa Kalibuntu, Koptan Lumbung Langgeng Pangan Desa Kedungneng, dan Koptan Sinergi Hasil Tani Desa Bojongsari dari 8 (delapan) desa wilayah terpilih program ICARE. Pembentukan koperasi petani tersebut berdasarkan kriteria dari 3 (tiga) yang telah terpenuhi yaitu aspek teknis, aspek finansial, dan aspek manajerial, serta dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi petani termasuk di dalamnya komitmen petani sebagai SDM pengelola koperasi petani. Melalui program ICARE dalam tahapan koordinasi, identifikasi potensi wilayah, dan sinergisitas, tahapan pembentukan koperasi petani secara inklusif, tidak terlepas dari dukungan semua pihak antara lain Pemerintah Kabupaten Brebes,



OPD Kab. Brebes, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Brebes, Dinas Usaha Mikro, Koperasi dan Perdagangan Kab. Brebes, Pemerintah Desa, Kecamatan, BPP, Perguruan Tinggi, Swasta, Notaris, dan pihak lain terkait. Setelah koperasi petani terbentuk diharapkan adanya usaha penguatan potensi yang dimiliki oleh kooptan antara lain : penyusunan dan implementasi bisnis plan, penguatan manajemen koperasi, pengembangan modal kerja koperasi, dan perluasan sumber pembiayaan, jaringan kerjasama dengan pihak lain (networking), perlindungan dan promosi usaha.

## DAFTAR BACAAN

**Anantanyu, S. 2009.** Partisipasi Petani dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Disertasi pada Institut Pertanian Bogor.

**Pusat Data dan Informasi Pertanian. 2023.** Statistik Pertanian (Agricultural Statistic) 2023, Pertanian Gemilang, Bangsa Cemerlang, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

**Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021.** Jawa Tengah dalam Angka 2023. BPS Jawa Tengah.

**Hermanto dan Swastika. 2011.** Penguatan kelompok tani: langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. Anal Kebijak Pertan. 9(4):371-390. **Kementerian Pertanian. 2022.** Project Operation Manual ICARE. Buku. Jakarta. **Kementerian Pertanian. 2022.** Pedoman Pembentukan Korporasi Petani (Pedoman KP). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.

**Mardikanto, T. 2010.** Konsep - Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Fakultas Pertanian – UNS Press. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

**Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016** tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

**Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018** tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.

**Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 16 Tahun 2018** tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

**Syahyuti. 2003.** Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

# PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI BERBASIS PEMBERDAYAAN PETERNAK KAMBING DALAM PENINGKATAN EKONOMI DESA

Iswanto, Hartono dan Muhammad Syahri Mubarak

Sektor pertanian dan peternakan merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan ekonomi desa. Di antara berbagai usaha peternakan yang ada di desa, peternakan kambing memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang kaya sumber daya genetik hewan salah satunya kambing dan domba. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang masuk tiga besar jumlah populasi ternak ruminansia kecil yaitu kambing dan domba nasional (Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2022), dalam Nurfaizin, dkk 2023.

Kambing merupakan salah satu hewan ternak yang mudah dipelihara dan memiliki permintaan pasar yang stabil, baik untuk daging, susu, maupun produk olahan. Banyak desa di Jawa Tengah yang memiliki potensi peternakan kambing yang belum dikembangkan secara optimal. Dengan melakukan identifikasi terhadap potensi peternakan kambing, para peternak diharapkan dapat lebih memahami peluang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Adanya, pemberdayaan peternak kambing melalui pengembangan korporasi petani dapat menciptakan sinergi antar sesama peternak, mampu meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka akses pasar yang lebih luas.

Korporasi pertanian atau perusahaan pertanian adalah sebuah bisnis yang beroperasi dalam sektor pertanian atau industri makanan dan minuman dengan status hukum perusahaan atau korporasi. Korporasi pertanian dapat mencakup berbagai jenis kegiatan pertanian, misalnya, pemrosesan makanan, distribusi produk

pertanian, perdagangan komoditas pertanian, atau bahkan investasi dalam sektor pertanian (Unpland Projeck, Kementan. 2023).

Salah satu, langkah awal dalam pengembangan korporasi peternak kambing yaitu dengan melakukan pemberdayaan peternak baik melalui pendidikan/pelatihan maupun pendampingan pemberdayaan. Program pendidikan/pelatihan dapat mencakup manajemen peternakan, kesehatan ternak, teknik pemeliharaan, dan pemasaran produk. Sedangkan untuk kegiatan pendampingan pemberdayaan saat ini sedang dilaksanakan di Kelompok Tani Kingdom-8 Dusun Blanten, Desa Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang dimulai tahun 2022 sd. 2024. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, diharapkan peternak akan lebih mampu untuk mengelola dan mengembangkan usaha ternak mereka secara efektif, optimal dan sesuai standar.

Adapun sebagai gambaran contoh pemberdayaan peternak yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani Kingdom-8 adalah sebagai berikut :

## (1). Pembuatan Pakan Fermentasi

Kegiatan pembuatan pakan lengkap fermentasi dilaksanakan di kelompok ternak kambing Kingdom-8 di Dusun Blanten Desa Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.

Adapun bahan yang diperlukan :

Rumput lapang	40 kg
Rumput odot	30,75 kg
Dedak padi	10 kg
Daun turi	18 kg
Molases	1 kg
Garam	0,25 kg

Alat yang diperlukan :

Terpal, ember, timbangan, sabit, drum, sekop.

Untuk tahapan dalam pembuatan pakan lengkap fermentasi adalah sebagai berikut :

1. Bahan-bahan tersebut dipotong-potong 2-3 m cm ditimbang sesuai kebutuhan bahan
2. Tetes/Molases + garam diencerkan dengan air, ditaburkan diatas bahan mulai yang paling besar
3. Taburkan bekatul diatas bahan yang telah ditaburi campuran tetes dan garam
4. Bahan-bahan setelah ditaburi tersebut, diaduk sampai rata.
5. Bahan yang telah diaduk sampai rata, dimasukkan dalam drum yang telah disiapkan sampai padat.
6. Tutup drum dengan klem, sehingga rapat dan tidak ada udara yang masuk.
7. Setelah 21 hari pembuatan pakan lengkap fermentasi sudah jadi.
8. Diangin-anginkan 15 menit, setelah itu pakan lengkap fermentasi siap diberikan pada ternak kambing.

Adapun ciri-ciri hasil pakan lengkap fermentasi untuk pakan ternak yang baik (sudah jadi) yaitu baunya agak harum, warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan, teksturnya lemas (tidak kaku) tidak busuk dan tidak berjamur



Gambar 1.  
Pemotongan  
bahan



Gambar 2.  
Pencampuran  
bahan



Gambar 3.  
Pemasukan  
bahan



Gambar 4.  
Penutupan bahan  
dengan di klem

## (2). Pembuatan Pupuk

Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah :

Alat :

sekop, cangkul, ayakan, terpal, gembor

Bahan :

Kotoran ternak kambing : 96,9%

Dolomit : 2%

Molases/Tetes tebu: 1%

Dekomposer: 0,1%

Adapun langkah pembuatannya adalah sebagai berikut :

1. Bersihkan kotoran kambing (sisa-sisa pakan, plastik, dll), kemudian ratakan diatas terpal.
2. Larutkan molases kedalam air bersih
3. Tambahkan dekomposer ke dalam larutan molases
4. Semprotkan larutan molases yang sudah dicampur dengan dekomposer kedalam kotoran kambing sampai merata.
5. Taburkan dolomit kedalam kotoran kambing yang telah disemprot dengan larutan molases yang sudah ditambah dekomposer sampai merata.
6. Tutup rapat-rapat selama 4 minggu.
7. Setiap seminggu terpal dibuka, kemudian kotoran kambing diaduk-aduk kembali
8. Apabila kotoran kambing agak kering disemprot kembali dengan larutan molases sambil diaduk-aduk hingga merata.
9. Setelah minggu keempat terpal dibuka kemudian kotoran ternak kambing dapat digunakan sebagai pupuk organik.

Adapun dokumen kegiatannya sebagai berikut :



Gambar 1. Persiapan bahan



Gambar 2.  
Pengadukan  
bahan



Gambar 3.  
Penutupan  
bahan

### (3) **Penataan Kandang Kambing**

Kandang di Kelompok Tani Kingdom-8 yang semula penempatan kandang kambing jadi satu dengan rumah penduduk, sekarang setelah adanya penyuluhan, kandang tersebut sudah terpisah dari rumah penduduk. Kandang dibuat pada satu tempat khusus, hal ini ada beberapa keuntungan yaitu memudahkan pengawasan terhadap ternaknya, memudahkan pemberian pakan dan perawatan kesehatan.

### (4). **Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Hijauan Pakan Ternak.**

Mendorong poktan untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang masih kosong dengan ditanami hijauan pakan, seperti tanaman odot, indigofera, turi, kaliandra, maupun hijauan tanaman lain agar ternak kambing nutrisinya tercukupi, terutama saat musim kemarau ternak kambing tidak kekurangan pakan.

Strategi penting dalam pengembangan korporasi petani, selain dilakukan dengan melakukan rangkaian kegiatan pemberdayaan pada peternak, perlu juga dilaksanakan pembentukan kelompok tani atau koperasi peternak kambing. Melalui koperasi, peternak dapat saling berbagi sumberdaya, seperti pakan dan peralatan, serta melakukan pemasaran produk secara kolektif. Ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga dapat meningkatkan nilai daya tawar peternak di pasar.

Bagi para peternak meningkatnya nilai daya tawar dan memiliki akses pasar yang lebih luas, merupakan hal yang penting untuk meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, peternak dapat menemukan saluran distribusi yang

lebih baik. Diversifikasi produk olahan dari kambing, seperti susu kambing, keju, dan daging olahan, dapat meningkatkan nilai tambah dan menarik lebih banyak konsumen.

Penggunaan teknologi modern, seperti aplikasi manajemen peternakan dan platform e-commerce, juga merupakan upaya lain untuk mempermudah peternak dalam mengelola usaha ternak mereka dan menjangkau pasar. Melalui teknologi informasi ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang harga pasar, kebutuhan konsumen, dan tren industri, yang penting untuk pengambilan keputusan kedepannya.

Adanya pembangunan infrastruktur, seperti fasilitas penyimpanan dan sarana transportasi, juga sangat penting untuk mendukung usaha peternakan. Selain itu, kemudahan akses kepada sumber pendanaan melalui program pemerintah, bank, atau investor swasta juga diperlukan agar peternak dapat mengembangkan usaha mereka dengan baik.

Pengembangan korporasi petani berbasis pemberdayaan peternak kambing merupakan langkah strategis dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya pendekatan yang terintegrasi melalui pemberdayaan peternak, pembentukan koperasi, akses pasar, diversifikasi produk, dan pemanfaatan teknologi, para peternak dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan petani di kelompok tani Kingdom-8 dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir, pola kerja petani/peternak, sehingga dapat meningkatkan usaha tani ternaknya, dan dapat menumbuhkembangkan serta menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan diharapkan bisa berdaya saing tinggi (UU RI No. 19 tahun 2023).

Adanya upaya melalui kerjasama antara peternak, pemerintah, dan lembaga terkait, diharapkan potensi peternakan kambing di desa dapat dimaksimalkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat pedesaan.

## DAFTAR BACAAN

- Nurfaizin, Dwinta Prasetianti, Fitri Dwi Astuti, Dyah Haskarini. Standardisasi Kambing Kecobong. Warta BPSIP Jawa Tengah Vo. 01 2023.
- Unpland Projeck, Kementan. 2023. Tips Wujudkan Korporasi Pertanian Mandiri. <https://upland.psp.pertanian.go.id/artikel/1698715432/tips-wujudkan-korporasi-pertanian-mandiri>. Diunggah 9 Oktober 2024
- UURI Nomor 19 Tahun 2013. Perlindungan dan pemberdayaan petani. <https://hortikultura.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2015/06/UU-No.19-Tahun-2013-Perlindungan-dan-Pemberdayaan-Petani.pdf>. Diunggah 8 Oktober 2024

# MEDIA PUBLIKASI PENERAPAN STANDAR MENDUKUNG DISEMINASI DAN PROGRAM ICARE BPSIP JAWA TENGAH

Rizqi Permata Putri dan Yuni Wulandari

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Diseminasi adalah kegiatan menyebarkan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat secara efektif. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat masyarakat memperoleh informasi, sadar, menerima, dan memanfaatkan informasi tersebut (Irawan,dkk 2015). Salah satu kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh BPSIP Jawa Tengah yaitu mendukung program ICARE (Integrated Corporation of Agricultural Resource Empowerment).

ICARE atau pemberdayaan petani berbasis komoditas kawasan merupakan kegiatan besar sinergi antara *World Bank* dengan Kementerian Pertanian. Kegiatan ini menjadikan setiap lokasi yang ditunjuk sebagai kawasan dengan komoditas tertentu yang mempunyai nilai ekonomi yang baik dan dapat dikembangkan. Kegiatan dilaksanakan pada 9 (Sembilan) provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Jawa Tengah, dimana BPSIP Jawa Tengah menjadi satuan kerja penanggung jawab implementasi program. Lokasi kegiatan di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dengan luasan 1.000 ha meliputi 8 (delapan) desa yaitu Desa Kedungneng, Kalibuntu, Randusari, Dukuhsalam, Pekauman, Babakan, Karangjunti, dan Bojongsari dengan komoditas padi dan pisang. Kegiatan ICARE memfasilitasi pembentukan korporasi petani dalam kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum yaitu koperasi. Koperasi yang telah terbentuk yaitu Koperasi Sinergi Hasil Tani, Tumbuh Gelimang Pangan, dan Lumbung Langgung Pangan.

Dalam *Book of Profile* Program ICARE Kementerian Pertanian, menyebutkan bahwa bentuk manfaat yang diperoleh dari program ICARE yakni terjadinya peningkatan dalam beberapa aspek, antara lain : pengetahuan/kemampuan teknis usaha tani, diversifikasi dan rantai nilai komoditas padi dan pisang. Peningkatan pengetahuan tersebut tentunya memerlukan media publikasi untuk mendukung diseminasi dan program ICARE.

## MEDIA PUBLIKASI PRODUKSI BPSIP JAWA TENGAH

Tugas dan Fungsi dari Kementerian Pertanian diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 (BSIP, 2023). Salah satu fungsinya adalah Penyelenggaraan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian. Perwujudan dari fungsi tersebut diantaranya yaitu diseminasi penerapan inovasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian. Kegiatan diseminasi tentunya tak dapat terlepas dari dukungan media publikasi.

Media cetak merupakan salah produksi BPSIP Jawa Tengah untuk diseminasi. Berbagai media publikasi dalam bentuk cetak telah diterbitkan pada 2023 hingga 2024 meliputi leaflet, buku, panduan teknis, dan majalah semi-ilmiah hadir sebagai media diseminasi sekaligus pendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan BPSIP Jawa Tengah, termasuk Program ICARE seperti pada Tabel 1.

**Tabel 1. Media publikasi yang diterbitkan BPSIP Jawa Tengah.**

No	Judul	Tahun	Link
1.	Petunjuk Teknis Perbibitan Ayam KUB Terstandar	2024	<a href="https://repository.pertanian.go.id/items/f2a80c0e-32e3-4bd5-83f1-e38d2510e1f7">https://repository.pertanian.go.id/items/f2a80c0e-32e3-4bd5-83f1-e38d2510e1f7</a>
2.	Teknis Inseminasi Buatan pada Ayam	2024	<a href="https://repository.pertanian.go.id/items/ace56885-c504-4fb7-a23f-48ae9821656d">https://repository.pertanian.go.id/items/ace56885-c504-4fb7-a23f-48ae9821656d</a>
3.	Petunjuk Teknis Pisang Terstandar	2023	<a href="https://repository.pertanian.go.id/items/e8f8a1ca-047e-4d68-993b-3523d599df52">https://repository.pertanian.go.id/items/e8f8a1ca-047e-4d68-993b-3523d599df52</a>
4.	Warta BPSIP Jawa Tengah Vol. 1	2023	<a href="https://repository.pertanian.go.id/items/a2e72895-bf9b-49a7-8c3b-1c80d0d6ac9f">https://repository.pertanian.go.id/items/a2e72895-bf9b-49a7-8c3b-1c80d0d6ac9f</a>
5.	Teknik Penyemaian Benih Padi Sistem Kering	2023	<a href="https://repository.pertanian.go.id/items/5a1ef73a-dc55-4f70-b06a-a2f4dd9be9f9">https://repository.pertanian.go.id/items/5a1ef73a-dc55-4f70-b06a-a2f4dd9be9f9</a>
6.	Leaflet Standar Teknis Telur & DOC Ayam KUB	2023	<a href="https://repository.pertanian.go.id/items/5d8b08e2-7cc6-4dff-939c-6ca1a915ec8c">https://repository.pertanian.go.id/items/5d8b08e2-7cc6-4dff-939c-6ca1a915ec8c</a>
7.	Perbibitan Kambing dan Domba Terstandar	2023	<a href="https://repository.pertanian.go.id/items/337d8068-81c1-439d-8349-ba6b29224f4d">https://repository.pertanian.go.id/items/337d8068-81c1-439d-8349-ba6b29224f4d</a>
8.	Leaflet SNI Manggis	2023	<a href="https://repository.pertanian.go.id/items/2be84c29-4261-41b7-acbb-3a7c2c2e26be">https://repository.pertanian.go.id/items/2be84c29-4261-41b7-acbb-3a7c2c2e26be</a>
9.	Perbenihan Kacang Hijau Terstandar	2023	<a href="https://repository.pertanian.go.id/items/23411a20-0e6d-4dce-a164-2715ee293add">https://repository.pertanian.go.id/items/23411a20-0e6d-4dce-a164-2715ee293add</a>
10.	Standardisasi Benih Padi Inbrida	2023	<a href="https://repository.pertanian.go.id/items/8b81840f-42a1-4024-a8fd-6bc2eece1336">https://repository.pertanian.go.id/items/8b81840f-42a1-4024-a8fd-6bc2eece1336</a>



Gambar 1. Publikasi tercetak BPSIP Jawa Tengah

Selain dicetak, terbitan tersebut juga diunggah ke dalam media online BPSIP Jawa Tengah diantaranya website (<https://jateng.bsip.pertanian.go.id/>), katalog Perpustakaan BPSIP Jateng (<https://kikp-pertanian.id/bsipjateng/>), dan repository BPSIP Jateng (<https://repository.pertanian.go.id/>). Sedangkan melalui media elektronik dilakukan melalui siaran radio di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang rutin diantaranya Radio Merapi Boyolali program Siaran Penyuluhan Pertanian, RRI Semarang program Semarang Malam Ini dan Suara Serasi program Dialog Serasi. Khusus program pada Radio Suara Serasi juga disiarkan streaming pada kanal youtube.

Diseminasi melalui media cetak tentunya tidak hanya secara online/daring namun juga secara offline/luring. Kegiatan diseminasi lewat media cetak secara offline salah satunya program ICARE dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan lain sebagainya. Keberadaan media cetak tersebut tujuannya agar dapat dijadikan bahan acuan dan rekomendasi untuk kegiatan ICARE yang sedang dilaksanakan.

## REPOSITORY PUBLIKASI PENERAPAN STANDAR

Mengikuti perkembangan teknologi saat ini, masyarakat diberikan kemudahan untuk mengakses secara online. Media publikasi yang digunakan sebagai acuan disini adalah media publikasi yang tersedia di Repository Kementerian Pertanian.

Repository merupakan tempat penyimpanan digital terpusat untuk mengelola data-data hasil penelitian, seperti makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Repository juga dapat digunakan untuk berbagi data dan informasi terkait penelitian, seperti dataset, kode program, dan catatan penelitian (Ratna Patria, 2023). Sedangkan Repositori Kementerian Pertanian merupakan kumpulan koleksi digital dari publikasi terbitan lingkup Kementerian Pertanian. Publikasi tersebut terdiri dari terbitan berkala, berkala semi ilmiah, dan tidak berkala. Dalam penggunaannya repository Kementerian Pertanian dikelola oleh Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Pustaka, 2024). Setiap UPT Perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian diberikan akses untuk memasukkan produk publikasi masing-masing instansinya. Untuk mengetahui sejauhmana publikasi pada repository Kementan berdayaguna, dapat dilihat pada statistik.

Dari empat belas koleksi BPSIP Jawa Tengah pada repository Kementan memiliki jumlah viewers dan jumlah download yang beragam disajikan pada tabel 2.

**Tabel 2. Data Viewer dan Download koleksi BPSIP Jawa Tengah.**

No	Judul	Viewer	Download
1.	Teknik Penyemaian Benih Padi Sistem Kering	255 kali	144 kali
2.	Perbenihan Padi Terstandar dan Bersertifikat	164 kali	62 kali
3.	Perbibitan Kambing dan Domba Terstandar	60 kali	28 kali
4.	Standardisasi Benih Padi Inbrida	58 kali	26 kali
5.	Perbenihan Kacang Hijau Terstandar	43 kali	269 kali
6.	Petunjuk Teknis Pisang Terstandar	43 kali	31 kali
7.	Petunjuk Teknis Perbibitan Ayam KUB Terstandar	35 kali	18 kali
8.	Perbenihan Kedelai Terstandar dan Bersertifikat	36 kali	248 kali
9.	Perbenihan Ubi Kayu Terstandar dan Bersertifikat	34 kali	91 kali
10.	Warta BPSIP Jawa Tengah Vol. 1	32 kali	23 kali
11.	Teknis Inseminasi Buatan pada Ayam	14 kali	71 kali
12.	Leaflet Standar Teknis Telur & DOC Ayam KUB	6 kali	1 kali
13.	Leaflet SNI Manggis	5 kali	1 kali
14.	Brosur BPSIP Jawa Tengah	6 kali	1 kali



Dari tabel tersebut, data menunjukkan bahwa publikasi dengan jumlah tertinggi yang pertama adalah “Teknik Penyemaian Benih Padi Sistem Kering,” yang telah dilihat sebanyak 255 kali dan diunduh sebanyak 144 kali. Posisi kedua disusul “Perbenihan Padi Terstandar dan Bersertifikat” dilihat 164 kali dan diunduh 62 kali.

Petunjuk teknis berjudul “Teknis Penyemaian Benih Padi Sistem Kering” membahas mengenai penyiapan benih. Dalam mempersiapkan benih padi merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya padi. Keragaan persemaian benih padi menjadi benih padi akan menentukan pertumbuhan padi di lahan sawah. Dengan demikian kegiatan persemaian benih padi harus dipersiapkan dengan baik. Dalam penyemaian benih padi dianjurkan menggunakan benih bermutu (benih bersertifikat) dari Varietas Unggul Baru (VUB) Padi. Tujuan dari penyemaian benih padi adalah untuk mempersiapkan benih padi yang berkualitas sehingga memperoleh tingkat produktivitas yang optimal.

Selanjutnya publikasi dengan judul “Perbenihan Padi Terstandar dan Bersertifikat” merupakan buku yang membahas tentang cara menanam padi yang baik dan benar untuk menghasilkan gabah calon benih padi terstandar dan pengelolaan pasca panennya untuk menjadi benih padi terstandar. Benih sebagai salah satu komponen penentu keberhasilan usaha tani padi sehingga buku penting untuk diketahui oleh para petani dan petugas lapang dalam upaya percepatan diseminasi dan ketersediaan benih unggul VUB padi untuk mendorong terwujudnya agribisnis padi, peningkatan produktivitas dan produksi padi.

Kedua publikasi tersebut merupakan publikasi yang memiliki statistik tertinggi dari dua segi, yakni viewers dan download. Dari segi viewers menunjukkan ketertarikan sekilas pembaca terhadap publikasi, dalam arti cukup dengan melihat abstrak yang sudah mencerminkan isi publikasi tersebut. Dari segi jumlah download membuktikan bahwa publikasi tersebut memang dibutuhkan lebih detail, sehingga perlu melihat full text/keseluruhan.









## DUKUNGAN MEDIA PUBLIKASI PADA KEGIATAN ICARE BPSIP JATENG

Lokasi program ICARE Jawa Tengah berada di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dengan komoditas utama adalah padi dan pisang. Program pengembangan kawasan pertanian terstandar ICARE tahun 2022-2027, melalui program pertanian komoditas pisang yang terintegrasi dengan padi, di Kecamatan Losari, dengan target luasan 1.000 hektare (Wasdiun, 2022)

Koleksi publikasi mengenai padi terstandar penting dipakai sebagai bahan rekomendasi dan acuan dalam kegiatan ICARE. Selain koleksi yang diterbitkan oleh BPSIP Jawa Tengah, terdapat pilihan koleksi lain yang ada di repository. Beberapa contoh koleksi mengenai padi yang ada di repository sebagai berikut

**Table 3. Daftar media cetak repository tentang padi terstandar**

No	Cover	Judul / alamat repository
1		Deskripsi Varietas Unggul Baru Padi / <a href="https://repository.pertanian.go.id/items/54b85ddf-3006-4cf7-8ae5-e998a3af235e">https://repository.pertanian.go.id/items/54b85ddf-3006-4cf7-8ae5-e998a3af235e</a>
2		Penerapan Budidaya Perbenihan Padi Terstandar / <a href="https://repository.pertanian.go.id/items/5bbd5583-0f68-426b-a186-0f70667fb321">https://repository.pertanian.go.id/items/5bbd5583-0f68-426b-a186-0f70667fb321</a>
3		Penerapan Budidaya Tanaman Padi Terstandar / <a href="https://repository.pertanian.go.id/items/552d302f-631f-4e28-81e0-ba43418a288b">https://repository.pertanian.go.id/items/552d302f-631f-4e28-81e0-ba43418a288b</a>
4		Produksi Benih Padi Inbrida Terstandar Berdasarkan SNI 6233:2015 (Benih Padi Inbrida) / <a href="https://repository.pertanian.go.id/items/51390bce-ab94-4411-aa27-e419f97a32b4">https://repository.pertanian.go.id/items/51390bce-ab94-4411-aa27-e419f97a32b4</a>
5		Budidaya Tanaman Padi Gogo Terstandar / <a href="https://repository.pertanian.go.id/items/563e478e-96b9-4080-a0e5-938cb5419855">https://repository.pertanian.go.id/items/563e478e-96b9-4080-a0e5-938cb5419855</a>
6		"STARS" Standardisasi benih padi sehat, strategi pengembangan standar dan penilaian kesesuaian instrumen benih padi : Laporan Proyek Perubahan /



Begitu pula dengan publikasi tentang pisang, dimana pisang menjadi komoditas yang menjadi focus kegiatan ICARE BPSIP Jawa Tengah sesuai dengan arahan Sekretaris BSIP Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA., ingin agar komoditas Pisang dapat menjadi salah satu komoditas unggulan yang diingat orang sebagai salah satu icon Kabupaten Brebes selain telur asin maupun bawang merah (Yuni Wulandari, 2024).

Publikasi komoditas pisang dalam mendukung kegiatan ICARE yang ada di Repository Kementerian Pertanian yaitu "Petunjuk Teknis Panen dan Pascapanen Pisang Terstandar" dengan alamat repository <https://repository.pertanian.go.id/items/e8f8a1ca-047e-4d68-993b-3523d599df52>. Pada buku ini membahas mengenai Tanaman pisang yang mempunyai nilai manfaat tinggi karena hampir semua bagian tanamannya dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk. Buah pisang sendiri sangat populer dan banyak disukai masyarakat, namun sayangnya pisang merupakan produk mudah rusak. Untuk itu perlu adanya teknologi penanganan panen dan pascapanen untuk dapat memperpanjang umur simpan, selain itu supaya dapat dibuat berbagai produk turunan dan hasil samping supaya dapat menjadi penghasilan tambahan untuk petani pisang. Buku petunjuk teknis tersebut merupakan terbitan dari BPSIP Jawa Tengah dan satu-satunya buku petunjuk teknis pisang terstandar yang ada di Repository Kementerian Pertanian.

Dari semua metode diseminasi publikasi penerapan standar yang telah dilaksanakan BPSIP Jawa Tengah baik secara daring dan luring menunjukkan bahwa media publikasi penerapan standar efektif mendukung realisasi seluruh kegiatan yang dilakukan termasuk Program ICARE. Tidak hanya itu, dukungan dari media publikasi yang relevan akan dapat menunjang keberhasilan pencapaian tugas diseminasi BPSIP Jawa Tengah dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. (2024). Tugas dan Fungsi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Diakses pada 15 November 2024, dari <https://bsip.pertanian.go.id/organisasi/tugas-dan-fungsi>
- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah. (2024). Tentang Kami. Diakses pada 19 September 2024, dari <https://jateng.bsip.pertanian.go.id/>
- Irawan, Ai Dariah, dan Achmad Rachman. (2015). Pengembangan dan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Lahan Kering Masam. Diakses pada 19 September 2024, dari
- Ratna Patria. (2023). Apa itu Repository? Pengertian, Manfaat & Daftarnya (Lengkap!). Diakses pada 19 September 2024, dari <https://www.domainesia.com/berita/repository-adalah/>
- Repository Kementerian Pertanian. (2024). Search : Padi Terstandar. Diakses pada 19 September 2024, dari <https://repository.pertanian.go.id/search?query=padi%20terstandar>
- Universitas Pamulang . (2023). Diseminasi Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat. Diakses pada 19 September 2024, dari <https://ppkn.unpam.ac.id/diseminasi-bidang-pengabdian-kepada-masyarakat-program-studi-pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-universitas-pamulang/2023/05/28/>
- Wasdiun, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab Brebes. (2022). Kembangkan Pertanian Pisang, Brebes Raih Penghargaan. Diakses pada 15 November 2024, dari <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kembangkan-pertanian-pisang-brebes-raih-penghargaan/>
- Yuni Wulandari. (2024). Sekretaris BSIP Harapkan Pisang Menjadi Komoditas Unggulan Brebes. Diakses pada 15 November 2024, dari <https://jateng.bsip.pertanian.go.id/berita/sekretaris-bsip-harapkan-pisang-menjadi-komoditas-unggulan-brebes>



# PERAN PEMERINTAH/KEPALA DESA DALAM MENDUKUNG KORPORASI PETANI

(Studi Kasus Desa Kalibuntu sebagai salah satu desa terpilih Program ICARE di Kec. Losari, Kab. Brebes, Jawa Tengah)

Tri Cahyo Mardiyanto dan Dedi Untung Nurhadi

Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment (ICARE) merupakan program Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk mengembangkan sistem produksi pertanian diversifikasi dan rantai nilai produk pertanian yang inklusif di kawasan/lokasi pertanian terpilih untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan melalui kegiatan dan pemberdayaan teknologi serta inovasi secara integratif dan kolaboratif. Lokasi Program ICARE di Provinsi Jawa Tengah terletak di Kec. Losari, Kab. Brebes dengan targetnya adalah pembentukan korporasi padi dan pisang. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2021 yang mengamanatkan Kementerian Pertanian melaksanakan program pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan beras premium (Kementerian Pertanian, 2022).

Beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pada program ICARE adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur/fasilitas, peningkatan produktivitas, efisiensi penggunaan input dan usaha tani sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Selain itu, program ini juga meningkatkan layanan dan akses teknologi informasi. Akhirnya, program ini menghasilkan keberlanjutan sistem produksi dan peningkatan kawasan pertanian berbasis korporasi dan inovasi.

Program ICARE secara inklusif dalam pemberdayaan petani untuk mendukung pembentukan korporasi petani, tetap melibatkan semua stakeholder terkait. Terdapat peran kepala desa di wilayah terpilih program ICARE untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam melaksanakan kebijakannya sebagai kepala desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa harus mampu mengubah cara pandang dalam sistem pembangunan Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara (Purnamasari, 2019).

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa. Pembangunan desa selanjutnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh (Sari, 2019). Pembangunan desa bersifat multiaspek, perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar desa sehingga dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.



Pemerintah desa menyelenggarakan kewajiban dalam merumuskan program-program yang tepat sebagai upaya memberikan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Kondisi masyarakat desa saat ini telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga perlu ada peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat desa dapat berdaya guna dan mandiri. Studi kasus Desa Kalibuntu sebagai salah satu desa terpilih program ICARE merupakan wilayah desa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Desa Kalibuntu mempunyai luas wilayah sekitar 343.014 Ha terbagi dalam wilayah administratif meliputi 4 pedukuhan, 4 RW, dan 17 RT. Jumlah penduduk Desa Kalibuntu akhir Desember 2023 tercatat 8.395 orang dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 408 orang/km<sup>2</sup>.

Pembangunan di Desa Kalibuntu 2018 – 2023 secara umum menunjukkan perkembangan hasil ke arah perbaikan kualitas hidup, walaupun dirasakan belum signifikan (Koperasi Pertanian Tumbuh Gelimang Pangan, 2024). Terkait dengan program ICARE di Jawa Tengah, Desa Kalibuntu merupakan 1 dari 8 desa terpilih Program ICARE yang ada di Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Hasil penetapan lokasi dan penerima manfaat di Desa Kalibuntu mencapai luasan 216.271 Ha meliputi luasan pisang 7.755 Ha, pisang-padi 8.125 Ha dan padi 200.391 Ha. Jumlah petani yang terlibat mencapai 430 orang meliputi petani pisang 16 orang, petani pisang-padi 8 orang dan petani padi 406 orang.

Namun ada beberapa permasalahan utama berkaitan dengan kondisi tersebut yaitu : (i). Potensi pertanian sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga pertumbuhannya relatif lambat bahkan cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, 44,48% masyarakat miskin bekerja di sektor pertanian (petani dan buruh tani) yang sulit meningkat kesejahteraannya akibat pertumbuhan sektor pertanian yang relatif lambat; (ii). Di sisi lain sektor perdagangan dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat, maka diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global; (iii). Dalam kaitan dengan upaya penataan sistem perdagangan perlu dilakukan penataan sarana perdagangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan guna meningkatkan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka mendukung sistem logistik nasional, pengamanan perdagangan dalam negeri, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.




Dengan latar belakang warga adalah petani, diharapkan melalui program ICARE dalam penguatan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani berbasis korporasi (dalam bentuk koperasi petani), diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Desa Kalibuntu, tentu saja sangat didukung oleh kebijakan dan perhatian dari peran seorang Kepala Desa selaku pemangku kepentingan langsung di tingkat desa. Robbins (2002) menjelaskan bahwa peran merupakan pola perilaku dan sikap yang diharapkan dari seseorang karena status ataupun kedudukannya. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan (Markus, 2018). Sumardjo dalam M. Askin (2022) menjelaskan pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.

Pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 113 tahun 2014 adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadi alasan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani sangatlah penting. Pemerintah memiliki kewajiban untuk secara berkelanjutan berupaya memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonomi maupun sosial sehingga masyarakat petani dapat hidup secara mandiri. Peran pemerintah desa lebih lanjut pada pemberdayaan masyarakat petani melalui program ICARE dalam peningkatan kelembagaan petani berbasis korporasi petani di Desa Kalibuntu, Kec.Losari, Kab. Brebes menggunakan pendekatan teori peran pemerintah dengan 4 indikator yaitu peran pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator dan Katalisator (Arif dalam Nurdin, 2014).

Peran pemerintah desa sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat petani di Desa Kalibuntu merujuk pada peraturan UU Undang-Undang No Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU Undang-Undang No Nomor. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Berdasarkan peraturan umum tersebut, pemerintah Desa Kalibuntu telah melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk merencanakan pemberdayaan dengan tujuan memajukan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelompok tani (poktan) termasuk gapoktan di Desa Kalibuntu supaya mampu, mandiri dan berdaya saing tinggi dalam kegiatan usaha tani.



Salah satu regulasi Pemerintah Desa Kalibuntu melalui Kepala Desa telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa mengenai pembentukan kelompok tani dan penetapan pengurusnya yaitu Keputusan Kepala Desa Kalibuntu Nomor: 523.2/09/Tahun 2023 tentang Perkumpulan organisasi kelompok tani periode 2023 s.d 2026, dengan pembentukan 5 (lima) Poktan dan Gapoktan yaitu Poktan Mukti, Subur, Abadi, Makmur dan



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBUNTU**  
KECAMATAN LOSARI KABUPATEN BREBES

NOMOR : 523.2 / 09 / TAHUN 2023

TENTANG

**PERKUMPULAN ORGANISASI KELOMPOK TANI**  
PERIODE 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA KALIBUNTU,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna memberdayakan masyarakat sekaligus menggerakkan partisipasi warga masyarakat tani Desa Kalibuntu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa maka perlu membentuk sebuah wadah Perkumpulan Petani ( Poktan )
- b. bahwa untuk tujuan tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa ;

**Mengingat :**

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah
2. Undan -Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 203 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penataan Lembaga
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2007 tentang Desa Air
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Keuangan Daerah
8. Keputusan Bupati Brebes Nomor : 007 Tahun 2002 tentang Desa Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Kab Brebes

9. Hasil Rapat Mustawarah Tanggal 30 Nopember 2023 Bertempat di Kantor Balai Desa Kalibuntu.

**MEMUTUSKAN:**


**Mencantumkan :**

**KESATU :** Menetapkan Organisasi Kelompok Tani SUBUR di Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

**KEDUA :** Mengangkat dan Menetapkan nama - nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Perkumpulan Kelompok Tani ( Poktan ) di Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Periode 2023 – 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini .

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Kalibuntu  
Pada tanggal : 30 Nopember 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes,
2. Kepala DPKP Kecamatan Losari
3. Arsip.

### Surat Keputusan Kepala Desa Kalibuntu tentang Kepengurusan Kelompok Tani, tanggal 30 November 2023

Seiring dengan adanya program ICARE di Jawa Tengah dengan kegiatan penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi, Pemerintah Desa Kalibuntu mendukung dan berkomitmen untuk melakukan perlindungan terhadap petani melalui penyediaan fasilitas sarana dan prasarana produksi pertanian, menyediakan fasilitas dan permodalan, kepastian usaha, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan dan pendampingan yang sesuai amanat UU Undang-Undang No Nomor. 19 tahun 2013 pasal 7 ayat 2 dan 3.

Peran pemerintah desa sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian pembinaan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Pembinaan dan pengarahan ini sangat penting bagi pemberdayaan masyarakat petani. Hal ini diperlukan untuk memelihara dinamika badan tertentu yang dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat. Pemerintah Desa Kalibuntu dalam melaksanakan pemberdayaan petani melalui program ICARE bekerja bersama dengan BPP Kec. Losari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Brebes untuk memberikan pembinaan dengan tujuan meningkatkan kualitas petani.

Inisiasi pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) atau korporasi petani dalam rangka mendukung program ICARE, Kepala Desa berupaya memotivasi petani khususnya melalui Gapoktan Bina Sejahtera untuk selalu aktif dalam pembinaan petani anggota khususnya mengaktifkan kembali pertemuan rutin di setiap kelompok tani.

Hal ini terbukti bahwa melalui program ICARE, Desa Kalibuntu merupakan Desa pertama yang membentuk koperasi petani dengan nama Koperasi Konsumen Tumbuh Gelimang Pangan pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan Nomor Badan Hukum: AHU-0003287.AH.01.29 Tahun 2023, sehingga dapat dikatakan bahwa Desa Kalibuntu secara pemikiran lebih maju dibandingkan dengan desa lain dan merupakan percontohan bagi inisiasi koperasi petani desa lain. Awal terbentuknya Koperasi Tumbuh Gelimang Pangan Desa Kalibuntu berjumlah 14 orang, sampai saat ini mencapai 113 orang. Hal ini menunjukkan adanya semangat dari petani untuk maju bersama dalam wadah koperasi pertanian yang telah terbentuk.

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Pemerintah desa berusaha menciptakan suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan kelompok tani. Pemerintah Desa Kalibuntu sudah responsif, dimana kepala desa Bersama-sama dengan aparaturnya sering memberikan fasilitasi aula pertemuan desa untuk pertemuan-pertemuan



**Pengukuhan Pengawas dan Pengurus Koperasi Petani Tumbuh Gelimang Pangan Desa Kalibuntu, tanggal 28 Agustus 2023**

gapoktan dalam inisiasi pembentukan koperasi petani mulai dari pertemuan calon pendiri koperasi petani, rebug gapoktan, pertemuan kelengkapan administrasi untuk pendaftaran koperasi petani di notaris sampai dengan pengukuhan pengurus dan pengawas koperasi petani yang terbentuk (Koperasi Petani Tumbuh Gelimang Pangan) di Desa Kalibuntu. Menurut Kepala Desa Kalibuntu, program ICARE sangat bagus dan sejalan dengan visi dan misi pemerintah Desa Kalibuntu dalam mensejahterakan masyarakat petani, sehingga Kepala Desa Kalibuntu ikut aktif dan mengawal dalam pembentukan koperasi petani.

Hal ini terbukti melalui rapat seluruh anggota pendiri, Kepala Desa Kalibuntu dipercaya menjadi Ketua Pengawas Koperasi petani dan Sekretaris Desa (Sekdes/Carik) dipercaya menjadi Ketua Koperasi Petani serta sekretaris dan bendahara, dan anggota pengawas melibatkan petani muda.



**Akta Badan Hukum Koperasi Petani Tumbuh Gelimang Pangan Desa Kalibuntu, tanggal 11 Agustus 2023**

Peran pemerintah desa sebagai katalisator yaitu pemerintah desa berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang berfungsi sebagai modal sosial untuk membangun partisipasi masyarakat petani. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan masyarakat. Selain itu peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan. Pemerintah Desa Kalibuntu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani melakukan pembinaan kelompok tani. Selain itu juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kab. Brebes melalui PPL BPP Kec. Losari.

Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur suatu wilayah, wajib melaksanakan dan memberikan pelatihan, fasilitas, sarana dan prasarana serta persediaan modal guna meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat petani. Pemerintah Desa Kalibuntu untuk mewujudkan hal tersebut, melalui program ICARE telah

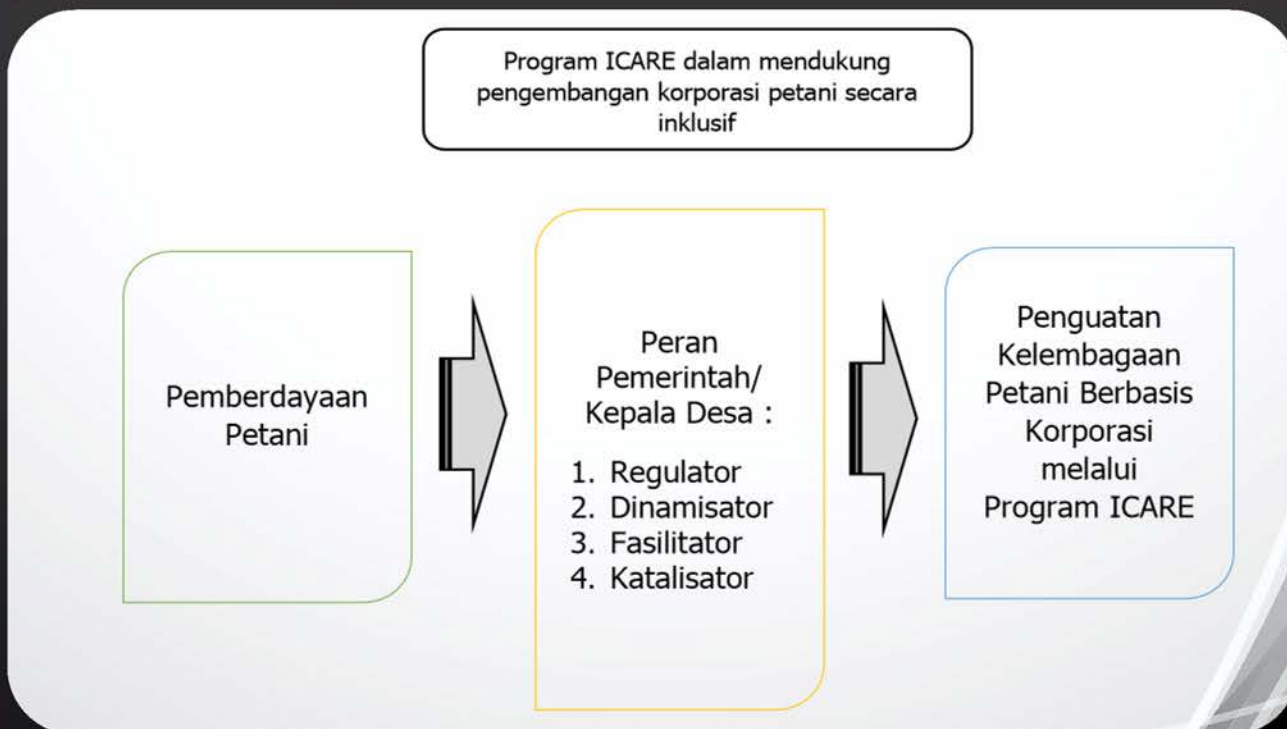


**Pertemuan petani dalam rangka sosialisasi dan perekrutan anggota Koperasi Petani Tumbuh Gelimang Pangan di Aula Desa Kalibuntu**

aktif ikut bergerak mendukung pengembangan kelembagaan petani berbasis korporasi yaitu dengan menghimpun semua petani yang tergabung dalam kelompok tani, merencanakan dan mendorong pembentukan dan pengembangan Koperasi Petani Tumbuh Gelimang Pangan. Selain itu, Kepala Desa Kalibuntu bersama-sama dengan Pengurus dan anggota Koperasi Petani Tumbuh Gelimang Pangan juga telah berencana menjalin kerjasama dengan pihak swasta PT. Kitani yang bergerak di bidang budidaya pisang cavendish, mengingat sebagian petani dan potensi Desa Kalibuntu untuk pengembangan pisang cavendish. Kerjasama ini ditindaklanjuti dengan adanya studi banding petani pisang Desa Kalibuntu didampingi Kepala Desa dan PPL BPP Kec. Losari ke kantor dan lahan PT. Kitani yang berada di Lampung.

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Kalibuntu telah berupaya melaksanakan pemberdayaan masyarakat petani melalui Program ICARE dengan harapan bersama-sama pemerintah desa, petani mendapatkan pelatihan, fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan masyarakat petani dalam rangka penguatan kelembagaan petani dan pengembangan korporasi petani. Menurut penulis, peran Pemerintah Desa Kalibuntu cukup baik dan cukup maksimal. Peran pemerintah desa sebagai regulator sudah merujuk UU Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diturunkan menjadi Keputusan Kepala Desa Kalibuntu Nomor: 523.2/09/Tahun 2023 tentang Perkumpulan organisasi kelompok tani periode 2023 s.d 2026. Peran kepala desa sebagai dinamisator cukup optimal karena pemerintah desa melalui kepala desa berupaya memotivasi petani khususnya melalui Gapoktan Bina Sejahtera untuk selalu aktif dalam pembinaan petani anggota. Tindak nyata dengan mengaktifkan kembali pertemuan rutin di setiap kelompok tani hingga terbentuknya Koperasi Petani Tumbuh Gelimang Pangan. Pemerintah desa sebagai fasilitator telah beberapa kali memfasilitasi aula Desa Kalibuntu untuk pertemuan kelompok tani dan gapoktan, pertemuan pendiri/pelopor koperasi petani, rebug gapoktan sampai dengan pengukuhan pengawas dan pengurus Koperasi Petani Tumbuh Gelimang Pangan Desa Kalibuntu.

Peran pemerintah desa sebagai katalisator terlihat Pemerintah Desa Kalibuntu melalui program ICARE aktif ikut bergerak dalam mendukung pengembangan kelembagaan petani berbasis korporasi yaitu menghimpun semua petani yang tergabung dalam kelompok tani, merencanakan dan mendorong pembentukan dan pengembangan Koperasi Petani Tumbuh Gelimang Pangan. Selain itu kemampuan menjalin kerjasama dengan pihak swasta (PT. Kitani) untuk pengembangan budidaya pisang cavendish. Perencanaan ke depan menjadi salah satu unit usaha koperasi petani yang sudah terbentuk. Secara skematis peran pemerintah/kepala desa dalam mendukung pengembangan korporasi petani melalui program ICARE terlihat pada Gambar di bawah ini.



Skema peran pemerintah/kepala desa dalam mendukung pengembangan korporasi petani melalui Program ICARE

## DAFTAR BACAAN

1. Askin, M., Rusli, A., Nadila, N., Nurfaidzin, Subrata, A. B., Aziz, R. dan Achmad, M. F. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Lengkong melalui Pelatihan. *Journal of Community Empowerment*, Vol. 4(1), Hal. 22-28.
2. Kementerian Pertanian. 2022. Project Operation Manual ICARE. Jakarta.
3. Koperasi Petani Tumbuh Gelimang Pangan. 2023. Profil Desa Kalibuntu dalam Proposal Matching Grant (Konsep). Desa Kalibuntu, Kec. Losari, Kab. Brebes.
4. Markus, A., Nayoan, H., dan Sampe, S. 2018. Peranan Lembaga Adat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1(1)
5. Nurdin, M. 2014. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
7. Purnamasari, G. C. 2019. Pergeseran Fungsi dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3(2), Hal. 161–174.
8. Robbins, S. P. 2002. *Perilaku Organisasi*. Edisi 5. Erlangga. Jakarta
9. Sari, A. E., Salamah, S., dan Albetris, A. 2019. Dampak Dimensi Intellectual Capital Terhadap Knowledge Management Pendamping Desa di Kabupaten Kerinci. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, Vol. 4(2), Hal. 220-227.
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani

# TRANSFORMASI KELOMPOK WANITA TANI MENJADI KORPORASI PETANI

Dedi Untung Nurhadi, Fitri Lestari

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) merupakan salah satu terobosan dalam upaya mendorong petani untuk mengembangkan usaha di sektor pertanian yang dikelola oleh petani sendiri secara professional. Lingkup KEP yang dapat dikembangkan petani mencakup kelompok usaha bersama (KUB), koperasi, CV dan perseroan terbatas (PT). Korporasi petani adalah transformasi dari kelembagaan ekonomi petani (KEP) menjadi kelembagaan ekonomi petani yang lebih besar, kuat, dan mandiri.

Korporasi petani belum benar-benar dikenal di lapangan. Untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih luas dan meningkatkan skala usaha, ekonomi, dan posisi tawar petani, diperlukan terobosan dalam pengembangan Korporasi petani. Pengembangan Korporasi petani saat ini masih menghadapi sejumlah masalah, antara lain pengelolaan kelembagaan dan usaha yang belum profesional, unit usaha yang belum berorientasi pada profit, serta masih banyak yang belum memiliki kekuatan hukum sehingga mempunyai posisi tawar dan aksesibilitas yang rendah terhadap sumber informasi, teknologi, pembiayaan maupun pasar.

Wanita tani memiliki peranan penting dalam pengelolaan usaha tani termasuk dalam hal ini usaha pengolahan hasil pertanian. Usaha yang dilakukan disela-sela menunggu musim panen serta untuk menambah penghasilan bagi keluarga dilakukan olehnya. Kerjasama antara petani dan wanita tani ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berkembangnya koperasi kredit khususnya adalah berkat keaktifan kaum wanita petani, karena merekalah yang menentukan akan keperluan kredit untuk tata rumah tangga keluarga maupun tata rumah tangga usaha tani.

Kelompok wanita tani (KWT) merupakan salah satu kelembagaan petani yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. KWT berperan sebagai wadah bagi wanita tani untuk mengembangkan potensinya dalam bidang pertanian. KWT dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan petani dengan cara meningkatkan produktivitas pertanian dan pemasaran produk pertanian. KWT juga dapat mengembangkan usaha-usaha lain di luar pertanian, seperti usaha simpan pinjam, kuliner, dan kerajinan tangan.

## KELOMPOK WANITA TANI

Wanita pada umumnya mempunyai peran ganda. Sebagai seorang ibu rumah tangga, ia memainkan peran lain dalam memperbaiki situasi ekonomi keluarga, yang semakin penting dalam satu dekade terakhir. Pengertian Wanita Tani menurut Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian Nomor : K/LP.620/147/X/92k, tanggal 8 Oktober 1992 tentang Pedoman Umum Pembinaan Wanita Tani adalah kaum wanita yang berstatus petani (ibu, anak, mertua, kemenakan, dan lain-lain). Ciri-ciri wanita tani adalah istri atau keluarga lain yang hidup dan mencukupi nafkahnya dari berusaha tani, mandiri dan usia rata-rata di atas 35 tahun. Sehingga dapat diartikan bahwa wanita tani itu selain mengurus rumah tangga, mereka membantu suami melaksanakan usahataniya dan sambil menunggu panen tiba juga melakukan usaha pengolahan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga istilah Wanita tani diciptakan ketika perempuan berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka dengan bertani bersama petani.

Perempuan desa berperan aktif dalam sektor perekonomian seperti pertanian, hortikultura, peternakan, dan perdagangan. Di rumah, perempuan desa juga memproduksi barang-barang rumah tangga seperti peralatan makan dan makanan. Peran perempuan juga diperlukan dalam sistem sosial yang ada di mana laki-laki dan perempuan saling melengkapi.

Wanita tani yang melakukan usaha pengolahan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sudah barang tentu harus memiliki keberanian untuk mengambil resiko apabila hasil olahannya tidak diterima dipasaran/konsumen. Kemampuan untuk membaca dan menangkap peluang tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai jiwa kewirausahaan.

Permasalahan yang dijumpai di lapangan bahwa masyarakat desa terutama kaum wanita, mengalami keterbatasan dalam permodalan, teknologi, dan organisasi yang berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas usaha, lemahnya posisi tawar di pasar, dan rendahnya respon terhadap program pemerintah, sehingga partisipasi kelompok menjadi rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik wanita tani selain mempunyai kemauan untuk memperoleh penghidupan yang layak melalui usaha pengolahan namun juga terkendala oleh berbagai permasalahan yang melingkupinya antara lain wanita tani dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan yang cenderung belum optimal serta belum profesional dalam pengolahan hasil pertanian.

Kelompok tani pada umumnya didominasi laki-laki. Seiring dengan semakin kompleksnya persyaratan, kebutuhan dan perkembangan, kekuatan inovatif kelompok wanita tani semakin berkembang sebagai wadah bagi perempuan untuk mendorong inovasi lebih lanjut di sektor pertanian. Kelompok Wanita Tani merupakan kelompok pendukung yang tumbuh dari, melalui, dan untuk masyarakat.

Organisasi KWT didirikan sebagai wadah bagi perempuan petani untuk bersama-sama berjuang dan bekerja sama meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui upaya bersama secara berkelompok. Peran kelompok wanita tani perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan, mengembangkan dan memperkuat sumber daya alam dan manusia yang ada sehingga dapat mengoptimalkan potensi pertanian lokal.

Salah satu dari kekuatan kunci KWT adalah kemampuannya untuk memberikan dampak positif pada kehidupan sosial anggotanya, dan manfaat lanjutan bagi komunitas desa (Fatih dan Sudiyo, 2017). Anggota KWT merasakan bagaimana keikutsertaan dalam KWT telah meningkatkan kualitas hidup mereka dan banyak kesempatan untuk berbagi waktu dengan perempuan lain secara rutin. Hasil dan manfaat yang diperoleh dengan dibentuknya kelompok tani, diantaranya adalah semakin cepatnya perembesan (difusi) inovasi atau teknologi baru, semakin meningkatnya orientasi pasar baik yang berkaitan dengan input maupun produk yang dihasilkannya, serta dapat memanfaatkan secara lebih optimal semua sumberdaya yang tersedia.

## KORPORASI PETANI

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, korporasi petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.

Korporasi petani dapat dibentuk oleh petani dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing usaha tani. Korporasi petani dapat melakukan berbagai kegiatan, seperti:

- Pengembangan usaha tani, seperti pengolahan lahan, penyediaan sarana produksi, dan pemasaran produk pertanian.
- Pengembangan usaha di luar pertanian, seperti usaha simpan pinjam, kuliner, dan kerajinan tangan.
- Peningkatan kapasitas petani, seperti pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.

Pembentukan korporasi petani dapat dibentuk melalui transformasi dari kelembagaan ekonomi petani (KEP) menjadi kelembagaan ekonomi petani yang lebih besar, kuat, dan mandiri.

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melakukan kegiatan usahatani untuk petani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. KEP tumbuh melalui bantuan program pemerintah seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kelembagaan ekonomi petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan ekonomi petani memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dibentuk oleh, dari, dan untuk petani. Artinya, kelembagaan ekonomi petani merupakan lembaga yang didirikan oleh petani sendiri, untuk kepentingan petani sendiri, dan dikelola oleh petani sendiri.
2. Melaksanakan kegiatan usahatani. Artinya, kelembagaan ekonomi petani memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani.
3. Baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Artinya, kelembagaan ekonomi petani dapat berbentuk koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lainnya, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.



## KORPORASI PETANI

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, korporasi petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.

Korporasi petani dapat dibentuk oleh petani dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing usaha tani. Korporasi petani dapat melakukan berbagai kegiatan, seperti:

- Pengembangan usaha tani, seperti pengolahan lahan, penyediaan sarana produksi, dan pemasaran produk pertanian.
- Pengembangan usaha di luar pertanian, seperti usaha simpan pinjam, kuliner, dan kerajinan tangan.
- Peningkatan kapasitas petani, seperti pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.

Pembentukan korporasi petani dapat dibentuk melalui transformasi dari kelembagaan ekonomi petani (KEP) menjadi kelembagaan ekonomi petani yang lebih besar, kuat, dan mandiri.

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melakukan kegiatan usahatani untuk petani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. KEP tumbuh melalui bantuan program pemerintah seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kelembagaan ekonomi petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan ekonomi petani memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dibentuk oleh, dari, dan untuk petani. Artinya, kelembagaan ekonomi petani merupakan lembaga yang didirikan oleh petani sendiri, untuk kepentingan petani sendiri, dan dikelola oleh petani sendiri.
2. Melaksanakan kegiatan usahatani. Artinya, kelembagaan ekonomi petani memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani.
3. Baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Artinya, kelembagaan ekonomi petani dapat berbentuk koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lainnya, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Beberapa contoh kelembagaan ekonomi petani di Indonesia antara lain: Kelompok Tani termasuk di dalamnya pemuda tani dan Wanita tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani, Perusahaan Perkebunan Rakyat, Perusahaan Perkebunan Besar Swasta.

Sesuai dengan bunyi Pasal 69 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihelai pasar melalui penerapan berbagai teknik pemberdayaan. KEP diharuskan untuk membentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan, kultur petani, dan potensi wilayah. Diharapkan dengan model ini, alternatif pemberdayaan petani dapat dikembangkan dengan mengembangkan usaha yang dikelola secara profesional oleh petani.

Pembentukan kelembagaan dalam bentuk koperasi petani dan/atau bentuk organisasi berbadan hukum lainnya dapat memberikan akses terhadap permodalan, antara lain penyediaan pupuk, simpan pinjam, obat-obatan, peralatan, teknologi pertanian, dan kebutuhan lainnya. Pembentukan kelembagaan perekonomian pedesaan merupakan langkah awal menuju pemberdayaan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat pedesaan. Penguatan organisasi dan pengembangan usaha seperti koperasi menjadi koperasi progresif harus menjadi kepentingan bersama.

Korporasi petani memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan membantu petani dalam hal meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, memperoleh akses terhadap sarana dan prasarana pertanian, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja di sektor pertanian, meningkatkan daya saing produk pertanian dan memperjuangkan kepentingan petani



## TRANSFORMASI KELOMPOK WANITA TANI MENJADI KORPORASI PETANI

Transformasi kelompok wanita tani menjadi korporasi petani merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani perempuan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. KWT merupakan salah satu kelembagaan ekonomi petani yang didominasi oleh perempuan. KWT memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi korporasi petani, karena:

- Petani perempuan memiliki peran penting dalam sektor pertanian.
- KWT memiliki kemampuan untuk berorganisasi dan bekerja sama.
- KWT memiliki akses terhadap sumber daya pertanian, seperti lahan, tenaga kerja, dan modal.

Transformasi kelompok wanita tani menjadi korporasi petani dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

- Peningkatan kapasitas anggota  
Anggota kelompok wanita tani perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Hal ini penting supaya anggota kelompok wanita tani dapat menjalankan kegiatan korporasi dengan baik.
- Peningkatan kelembagaan  
Kelembagaan kelompok wanita tani perlu ditingkatkan supaya dapat mendukung kegiatan korporasi. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti struktur organisasi, tata kelola, dan keuangan.
- Peningkatan modal  
Modal merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan kegiatan korporasi. Anggota kelompok wanita tani perlu meningkatkan modalnya, baik melalui modal sendiri maupun modal dari pihak lain.
- Pengembangan usaha  
Anggota kelompok wanita tani perlu mengembangkan usahanya agar dapat mencapai tujuan korporasi. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti pemilihan komoditas, pengembangan pola usaha, dan pemasaran produk.
- Peningkatan akses KWT terhadap sarana dan prasarana pertanian.
- Peningkatan akses KWT terhadap pasar bagi produk pertanian.

Transformasi KWT menjadi korporasi petani memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, memperoleh akses terhadap sarana dan prasarana pertanian yang lebih luas, mudah dan murah, meningkatkan pendapatan petani perempuan, memperluas kesempatan kerja di sektor pertanian, meningkatkan daya saing produk pertanian. Transformasi KWT menjadi korporasi petani merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

Latar belakang konsolidasi kelompok tani dan KWT menjadi korporasi petani berangkat dari kondisi petani seperti ; keterbatasan luas garapan petani, keterbatasan modal, pengelolaan secara individu, budidaya pertanian secara konvensional, manajemen usaha tani yang belum profesional, produk yang dijual masih dalam bentuk panen segar, hasil panen belum marketable, produksi tergantung dengan musim, pasar terbatas di local maupun regional, kapasitas gudang terbatas, dan limbah pertanian belum dimanfaatkan.

Dengan terbentuknya korporasi yang berangkat dari kelompok wanita tani diharapkan kelembagaan ekonomi petani menjadi lebih kuat dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani. KWT menjadi embrio yang sangat penting untuk tumbuh dan berkembangnya korporasi petani, selain dapat membantu petani dalam meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian, meningkatkan kekuatan dan daya saing wilayah serta membantu pengembangan Kawasan pertanian terpadu dan berkelanjutan.

## BAHAN BACAAN

- Fatih dan Sudiyo, 2017. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Dalam Memanfaatkan Kulit Buah Naga Sebagai Olahan Frozen Yogurt. Politeknik Negeri Lampung.
- Handayani, W.A. Tedjaningsih, T. dan Rofatin, B., 2018. Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Usahatani Padi. Jurnal AGRISTAN, 1(2): 80-88.
- Jamil, Ali dkk, 2023. Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Menuju Kemandirian Petani Untuk Kedaulatan Pangan. Mafy Media Literasi Indonesia
- Maulana, K. 2019. Peran Kelompok Tani Terhadap Kondisi Perekonomian Petani. Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian, 5(2): 67-71
- Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131. Sekretariat Negara. Jakarta
- Tjandra Irawan, 2022. Membangun Korporasi Petani, Prasetiya Mulya Publishing. Jakarta

# STOP PEMBAKARAN JERAMI PADI! MARI KITA KEMBALIKAN LAGI KE TANAH

Dwinta Prasetianti dan Restu Hidayah

Pemanasan global akhir-akhir ini mulai menunjukkan dampaknya dan diperlukan upaya untuk mengurangi aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca. Dampak pemanasan global antara lain perubahan iklim dan masalah kesehatan. Menghadapi hal tersebut, perlu dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap fenomena pemanasan global yang terjadi saat ini. Adaptasi adalah sistem yang beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, sedangkan mitigasi adalah upaya untuk mengurangi produksi gas rumah kaca (GRK) penyebab perubahan iklim. Sektor pertanian menyumbang 10-12% dari total gas rumah kaca antropogenik, yang terdiri dari gas  $N_2O$  dan  $CH_4$ , sedangkan sektor peternakan menyumbang sekitar 18-51% gas rumah kaca antropogenik, yang sebagian besar terdiri dari gas  $CH_4$  (metana).

Emisi GRK dari sektor pertanian di prediksi akan terus bertambah pada masa mendatang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan yang disebabkan oleh penggunaan lahan marginal dan peningkatan konsumsi daging (IPCC, 2016). Terdapat lima kegiatan di sektor pertanian yang menjadi sumber emisi GRK, antara lain peternakan, budidaya padi sawah, pembakaran sabana, serta pembakaran limbah pertanian dan lahan pertanian (IPCC, 2006) dan setiap tahun, hampir 60% jerami padi dibakar (pilihan di lahan untuk memanfaatkan jerami padi) (Toan *et al.*, 2022). Data dari Litbang Pertanian (2012) menunjukkan bahwa limbah jerami yang dibakar sebesar 37%, sebagai alas kandang 36% dan 15-22% sebagai sumber pakan, serta 7-16% untuk industri.

Gas  $CH_4$  (metana) hasil pertanian padi sawah berasal dari proses pembusukan sisa panen. Sekitar 1% gas metana yang ada sekarang ini di sumbangkan dari sistem persawahan. Gas metana tersebut terbentuk dari proses *anaerobic* bersama dengan bakteri metanogenik di lahan sawah yang terjadi pada jerami sisa hasil panen yang tidak termanfaatkan. Jerami padi merupakan limbah pertanian yang mengandung unsur hara yang berguna untuk menjaga kestabilan unsur hara tanah dan untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman (Pavithira *et al.*, 2017). Jerami padi mengandung 51,76% C organik, 0,65% nitrogen, 0,20% fosfor, 0,30% kalium (Goyal dan Shindu, 2011). Pemanfaatannya menjadi kompos tidak hanya menyediakan nutrisi penting bagi tanaman, tetapi menjadi upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan limbah (Tao *et al.*, 2024).





## PEMBAKARAN JERAMI DI KECAMATAN LOSARI, KABUPATEN BREBES

Kecamatan Losari merupakan lokasi kegiatan pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian yang berkelanjutan dan inklusif dengan komoditas pisang dan padi. Salah satu perlakuan terhadap jerami padi yang umum dilakukan oleh petani setelah musim panen adalah dengan cara dibakar. Dengan melakukan pembakaran jerami, sesungguhnya petani telah mengalami kerugian karena unsur hara yang terdapat di dalam sisa pertanaman tidak bisa dimanfaatkan untuk dikembalikan ke dalam tanah tempat petani melakukan budidaya pertanian. Unsur hara atau nutrisi merupakan zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam pembentukan jaringan tubuh dan pertumbuhan. Secara alami, unsur hara sudah diperoleh dari dalam tanah, namun keterbatasan unsur hara dalam tanah tidak mampu mencukupi kebutuhan nutrisi pada tanaman. Praktek pembakaran jerami secara terbuka telah terbukti menjadi sumber emisi karbon yang signifikan selama musim panen. Pembakaran jerami secara terbuka secara signifikan juga telah mempengaruhi kualitas udara (Chang *et al.*, 2013). Pembakaran jerami padi tidak saja menyebabkan polusi udara, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan perubahan iklim (Singh *et al.*, 2021). Padahal dengan introduksi teknologi sederhana, sesungguhnya limbah-limbah tersebut sudah dapat di olah menjadi pupuk organik (Muliarta, 2019).

Beberapa faktor yang menyebabkan petani tidak melakukan pengolahan limbah pertaniannya, yaitu :

- a. Petani tidak memahami manfaat limbah pertanian. Mereka hanya menganggap bahwa limbah tersebut hanyalah sampah yang harus dihilangkan karena mengganggu proses budidaya pertanian.
- b. Petani tidak mengetahui cara mengolah limbah pertanian. Tidak mengetahui cara mengolah limbah pertanian merupakan salah satu persoalan yang banyak terjadi di masyarakat, khususnya petani.
- c. Petani malas melakukan pengolahan limbah pertanian. Sudah menjadi tradisi bahwa salah satu penyakit masyarakat adalah sikap malas.
- d. Pengolahan limbah secara modern yang selama ini banyak diperkenalkan ke masyarakat terkesan sulit untuk dilakukan. Meskipun masih dijumpai banyak kendala tetapi potensi pemanfaatan limbah padi masih sangat besar untuk dimanfaatkan.

## PELATIHAN PENGOLAHAN LIMBAH JERAMI PADI

Program Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian yang berkelanjutan dan inklusif adalah ICARE (*Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment*). Lokasi program ICARE berada di 9 (sembilan) provinsi di Indonesia yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Di Jawa Tengah sendiri program ICARE dilaksanakan di Kwecamatan Losari Kabupaten Brebes dengan komoditas padi dan pisang. Program ICARE direncanakan akan berlangsung selama 5 (lima) tahun, mulai 2022 sampai 2027. Program ICARE didanai oleh program pinjaman luar negeri (PLN) Bank Dunia melalui *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dan dana pendamping Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan masih relatif rendahnya produktivitas dan pendapatan di sektor pertanian secara nasional juga ditemui di lokasi ICARE Kec. Losari, Kab. Brebes, Jawa Tengah. Faktor-faktor tersebut antara lain praktik-praktik usaha tani yang dilaksanakan tidak jarang turut mendegradasi kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim. Sebagai contoh, penggunaan input produksi berupa bahan kimia secara berlebihan dapat mengancam capaian produktivitas pertanian dalam jangka panjang, meningkatkan kerentanan terhadap serangan hama dan penyakit, serta meningkatkan emisi GRK melalui pembakaran jerami padi dan pemanfaatannya yang tidak optimal. Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, di antara kunci keberhasilan yang diperlukan untuk pengelolaan model kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian yang berkelanjutan dan inklusif di lokasi program ICARE, yaitu kapasitas mumpuni yang dimiliki dan diimplementasikan oleh petani, institusi pelaksana beserta seluruh pelaku/pemangku kepentingan terkait.

Saat ini, SDM pertanian di Indonesia secara umum masih berada pada taraf yang perlu ditingkatkan lagi. Mayoritas petani berusia tua dengan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga menjadi hambatan untuk dapat membawa pertanian ke arah yang lebih baik. Di sisi lain regenerasi SDM di sektor pertanian terhitung masih lambat. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan menyiapkan petani milenial. Saat ini, petani milenial memiliki peran penting. Sebab dibutuhkan dukungan dari SDM pertanian yang maju, mandiri, dan modern untuk meneruskan pembangunan di sektor pertanian. Perlu upaya yang sistematis agar petani milenial ini siap menghadapi tantangan dan permasalahan di sektor pertanian. Peran SDM Institusi pemerintah dalam hal ini petugas pendamping lapang (PPL) dan petugas dinas juga perlu ditingkatkan kapasitasnya. Tujuan secara umum kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai pemerintah serta petani melalui pelatihan. Pelatihan yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait lingkungan dan menekan emisi GRK adalah melalui pelatihan pengolahan jerami padi menjadi kompos.

## **1. PELATIHAN PENGELOLAAN LIMBAH JERAMI PADI**

Pelatihan dilaksanakan di Kab. Brebes pada tanggal 5 Maret 2024. Narasumber pelatihan adalah Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI) Lingkungan Pertanian. Metode pelatihan yang digunakan yaitu melalui pemaparan materi dan praktik. Materi yang disampaikan adalah pertanian ramah lingkungan dan pertanian organik. Untuk praktik, beberapa perwakilan dari peserta bersama narasumber membuat kompos berbahan jerami padi. Peserta dalam pelatihan ini sebanyak 40 orang yang terdiri dari petugas dinas dan penyuluh pendamping lapang dari 17 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Brebes.

Dari hasil monitoring dan evaluasi, meskipun adanya pelatihan ini petani belum memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran. Peserta pelatihan yang mayoritas adalah penyuluh belum bisa menyadarkan petani tentang pengolahan jerami padi menjadi kompos. Sehingga Upaya yang dilakukan adalah mencari alternatif metode dan cara lain agar memudahkan petani untuk mengolah limbah jerami padi menjadi kompos. Upaya tersebut adalah dengan melakukan pelatihan pengomposan jerami padi insitu menggunakan decomposer Petrogladiator.

## **2. PELATIHAN PENGOMPOSAN JERAMI PADI INSITU MENGGUNAKAN PETROGLADIATOR.**

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengomposan Jerami Padi dilakukan di dua desa yaitu Desa Karangjunti dan Desa Babakan (19 dan 20 Agustus 2024). Lokasi praktik pengomposan insitu bertempat di lahan sawah milik Bapak Fathuroji dan Bapak Rustam. Peserta pelatihan di Desa Karangjunti terdiri dari dua unsur yaitu ASN dan Petani. Unsur peserta ASN yaitu 20 ASN Penyuluh dan petugas Dinas dari Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Brebes dan Kersana. Unsur peserta petani yaitu 30 orang petani (15 orang petani Desa Karanjunti; 5 orang petani Desa Dukuh salam; 5 orang petani Desa Bojongsari; dan 5 orang petani Desa Kalibuntu). Pelatihan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah dan PT. Petrosida Gresik.

Pelatihan pengomposan jerami padi di Desa Babakan dilaksanakan dengan unsur peserta Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) Desa Babakan dan 30 orang petani (15 orang petani Desa Babakan; 5 orang petani Desa Randusari; 5 orang petani Desa Kedungneng; dan 5 orang petani Pekauman). PPL dan petani yang dilatih diberikan tugas untuk mengimplementasikan hasil pelatihan yang telah diperoleh dan menularkan pengetahuan yang dimiliki kepada yang lain.

Materi yang disampaikan di dua desa tersebut yaitu pengomposan insitu dengan aplikasi biodekomposer petrogladiator. Dosis dan cara aplikasi untuk sampah organik lunak adalah 0,2% (2 kg / ton bahan), aplikasi dicampur dengan 50 – 100 liter air dan disemprotkan secara merata pada bahan organik. Cara aplikasi pada lahan bekas panen padi yaitu:

- Petrogladiator padat : jerami dan tunggul jerami diratakan di lahan, lalu ditaburkan petrogladiator padat di lahan sesuai dosis aplikasi (10 kg per ha) lalu lahan ditaraktor/glebeg. Selanjutnya lahan dидiamkan selama minimal 14 – 30 hari, lahan siap digunakan.
- Petrogladiator cair : jerami dan tunggul jerami diratakan di lahan, lalu diaplikasikan petrogladiator cair di lahan sesuai dosis aplikasi (10 liter per ha diencerkan dalam 500 liter air/ha) lalu lahan ditaraktor/glebeg. Selanjutnya lahan dидiamkan selama minimal 14 – 30 hari, lahan siap digunakan.



**Pelatihan pengomposan jerami di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.**



**Pelatihan pengomposan jerami di Desa Babakan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.**

**Tabel 1. Penerima manfaat pelatihan**

No.	Kelompok Penerima Manfaat	Manfaat yang diterima
1.	ASN/ Penyuluh Pertanian	Penyuluh pertanian yang ditugaskan menjadi perwakilan petani. Penyuluh pertanian akan mendapatkan manfaat dan persepsi yang sama dengan petani sehingga harapannya ketika petani yang telah mengikuti kegiatan ini dan mengimplementasikannya di wilayah masing-masing, penyuluh yang membina memiliki persepsi yang sama dan dapat saling bersinergi dalam membina petani di wilayah binaannya sehingga hasil dari kegiatan ini dapat dirasakan meluas secara berkelanjutan.
2.	Petani	Petani yang menjadi sasaran kegiatan akan mendapatkan manfaat bagaimana memaksimalkan potensi dan kapasitas diri untuk mengembangkan usahataniya khususnya pengomposan Jerami padi sehingga mampu secara mandiri maupun berkelompok menjadi agen perubahan yang berdaya dan mampu memberdayakan potensi sumberdaya yang ada di masyarakat dan menjadi pelopor atau penggerak yang sehat, tangguh dan mandiri di wilayahnya masing-masing.

## PENGETAHUAN PESERTA PELATIHAN PENGOMPOSAN JERAMI PADI BAGI ASN DAN PETANI

Pengetahuan pengomposan jerami padi yang dimiliki petani erat kaitannya dengan sosialisasi dan pelatihan yang didapatkan dari petugas penyuluh lapangan (PPL). Peran PPL di lapangan menjadi sangat strategis dalam upaya meningkatkan pengetahuan petani mengenai pengolahan limbah pertanian dan pemanfaatannya. Harapannya, peningkatan petani tersebut memberikan dampak ekonomi petani.

### 1. Pengetahuan peserta pelatihan pengomposan jerami padi bagi ASN

Pengkajian dilaksanakan dengan pendekatan true experiment yaitu mengevaluasi dengan cara survei pre test dan post test kepada peserta pelatihan. Data yang diperoleh dianalisis dengan perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test (Rosner et al., 2005) dilanjutkan uji paired t-test untuk membandingkan rata-rata pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan (Steel dan Torrie, 1989). Pengetahuan adalah pengalaman nilai, informasi kontekstual, pandangan pakar dan intuisi mendasar yang memberikan suatu lingkungan dan kerangka untuk mengevaluasi dan menyatukan pengalaman baru dengan informasi. Informasi menjadi dasar dalam melakukan sesuatu hal karena pengetahuan akan memungkinkan seseorang atau organisasi dalam pengambilan tindakan yang berbeda atau lebih efektif dibandingkan dengan tidak memiliki pengetahuan (Davenport, 1988).

Hasil analisis uji Wilcoxon dengan  $n = 21$ , taraf kesalahan 5% menunjukkan nilai Asymp. Sig. 0,001 (Asymp. Sig.  $\leq 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan menggunakan metode ceramah dan praktek berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pengetahuan. Peningkatan pengetahuan responden mengenai pengomposan jerami padi setelah pelatihan mengalami peningkatan sebesar 23%. Dengan persepsi dan respon peserta pelatihan berada pada kategori tinggi yaitu masing-masing sebesar 97% dan 100%.

### 2. Pengetahuan peserta pelatihan pengomposan jerami padi bagi petani

Pelatihan pengomposan jerami padi di Desa Karangjunti tanggal 19 Agustus 2024 diikuti oleh 27 orang petani. Hasil analisis uji Wilcoxon dengan  $n = 27$ , taraf kesalahan 5% menunjukkan nilai Asymp. Sig. 0,000 (Asymp. Sig.  $\leq 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan menggunakan metode ceramah dan praktek berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pengetahuan. Peningkatan pengetahuan responden mengenai pengomposan jerami padi setelah pelatihan mengalami peningkatan sebesar 12,59%. Dengan persepsi dan respon peserta pelatihan berada pada kategori tinggi yaitu masing-masing sebesar 96,15% dan 100%.

Pelatihan pengomposan jerami padi di Desa Babakan tanggal 20 Agustus 2024 diikuti oleh 25 orang petani. Hasil analisis uji Wilcoxon dengan  $n = 25$ , taraf kesalahan 5% menunjukkan nilai Asymp. Sig. 0,014 (Asymp. Sig.  $\leq 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan menggunakan metode ceramah dan praktek berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pengetahuan. Peningkatan pengetahuan responden mengenai pengomposan jerami padi setelah pelatihan mengalami peningkatan sebesar 14,97%. Dengan persepsi dan respon peserta pelatihan berada pada kategori tinggi yaitu masing-masing sebesar 100% dan 88%.

## PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TANAMAN PADI SETELAH PELATIHAN

Faktor luar atau lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi antara lain intensitas cahaya matahari, suhu, air dan unsur hara atau nutrisi. Kondisi pertanaman padi setelah pelatihan cukup baik (pertumbuhan normal dan tanpa ada gejala serangan hama maupun penyakit tanaman yang mengawatirkan. Dan dilihat dari tingkat kepraktisan dari pelatihan sebelumnya petani tertarik untuk melakukan metode penanaman padi menggunakan pengomposan jerami insitu. Ketua kelompok tani yang lain juga akan mengaplikasikannya di Bulan Desember tahun 2024 untuk musim tanam pertamanya. Setelah panen sampai tanam disarankan ada jeda waktu 1 bulan agar kondisi lahan optimal.

Hasil analisa laboratorium kimia BPSIP Jawa Tengah dari unsur C organik yang diujikan mengalami peningkatan. Untuk Desa Karangjunti dari 0,71 menjadi 1,42 % (terjadi peningkatan sebesar 100%) sedangkan untuk Desa Babakan dari 0,94 menjadi 1,27 % (terjadi peningkatan sebesar 35,11%). Meskipun terjadi peningkatan, nilai kadar C-organik pada sampel tanah terdeteksi dalam kategori defisiensi (rendah). Rendahnya kadar C-organik dalam tanah berdampak pada pertumbuhan tanaman yang kurang optimal. Untuk meningkatkan kualitas dan kadar C- organik tanah, dianjurkan untuk menambahkan pupuk kompos atau urea agar mencapai standar yang sesuai dengan kualitas tanah yang baik. Pengomposan tidak hanya dilakukan sekali namun perlu ada pengomposan ulang pada MT berikutnya.

### Desa Karangjunti



Sebelum Pelatihan



Sesudah Pelatihan

### Desa Babakan



Sebelum Pelatihan



Sesudah Pelatihan

## KESIMPULAN

Limbah pertanian seperti jerami padi, sisa panen seringkali dianggap sebagai masalah lingkungan. Namun melalui pengomposan yang efisien, limbah pertanian dapat diubah menjadi pupuk organik yang kaya nutrisi. Pemanfaatan jerami tidak hanya mengurangi volume limbah yang terbuang tetapi juga menyediakan sumber karbon yang bernilai tinggi dalam proses pengomposan. Penerapan biomassa dalam pertanian melibatkan berbagai metode yang dirancang untuk memaksimalkan manfaat nutrisi yang dapat diperoleh dari sumber ini. Pengomposan merupakan praktik paling mudah dalam mengolah biomassa. Pelatihan pengomposan Jerami padi bagi ASN dan petani diharapkan mampu menjawab tantangan dalam peningkatan produktivitas pertanian berkelanjutan. Implementasi hasil pelatihan yang telah diperoleh dan menularkan pengetahuan yang dimiliki kepada yang lain merupakan dampak positif yang diharapkan.

## DAFTAR BACAAN

- Chang, C. H., Liu, C. C., & Tseng, P. Y. 2013. Emissions inventory for rice straw open burning in Taiwan based on burned area classification and mapping using Formosat-2 satellite imagery. *Aerosol and Air Quality Research*, 13(2), 474–487. <https://doi.org/10.4209/aaqr.2012.06.0150>.
- Davenport, T. H. 1988. *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*. Harvard Business Press.
- Goyal, S and S.S. Sindhu. 2011. Composting of Rice Straw Using Different Inocula and Analysis of Compost Quality. *Microbiology Journal*, 1: 126-138. <https://doi.org/10.3923/mj.2011.126.138>.
- IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. 2006. *Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Vol.4*. Japan : Institute for Global Environmental Strategies (IGES) for the IPCC.
- Litbang Pertanian, 2012. Fermentasi Jerami untuk Pakan Ternak Sapi Edisi 19-25 September 2012 No.3474 Tahun XLIII [www.litbang.pertanian.go.id/.../Fermentasi-Jerami-untuk-Pa.pdf](http://www.litbang.pertanian.go.id/.../Fermentasi-Jerami-untuk-Pa.pdf).
- Muliarta, I.N. 2019. A study on rice field farmer implementation of rice straw composting. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 343 012001.
- Pavithira, E., Sirisena, D. N., & Herath, H. M. S. K. (2017). Effect of Potassium Fertilizer Split Applications together with Straw on Optimum Level in Leaf and Stem of Rice. *Journal of Agricultural Sciences*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.4038/jas.v12i1.8203>.
- Rosner, B., Glynn, R. J., & Lee, M.-L. T. 2005. The Wilcoxon Signed Rank Test for Paired Comparisons of Clustered Data. *Biometrics*, 62(1): 185–192. doi:10.1111/j.1541-0420.2005.00389.x.

# EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE DISEMINASI DALAM PENGUATAN KORPORASI PETANI KEDELAI

Sri Murtiati, SP., M.Si dan Muh. Syahri Mubarak, SST., M.P.

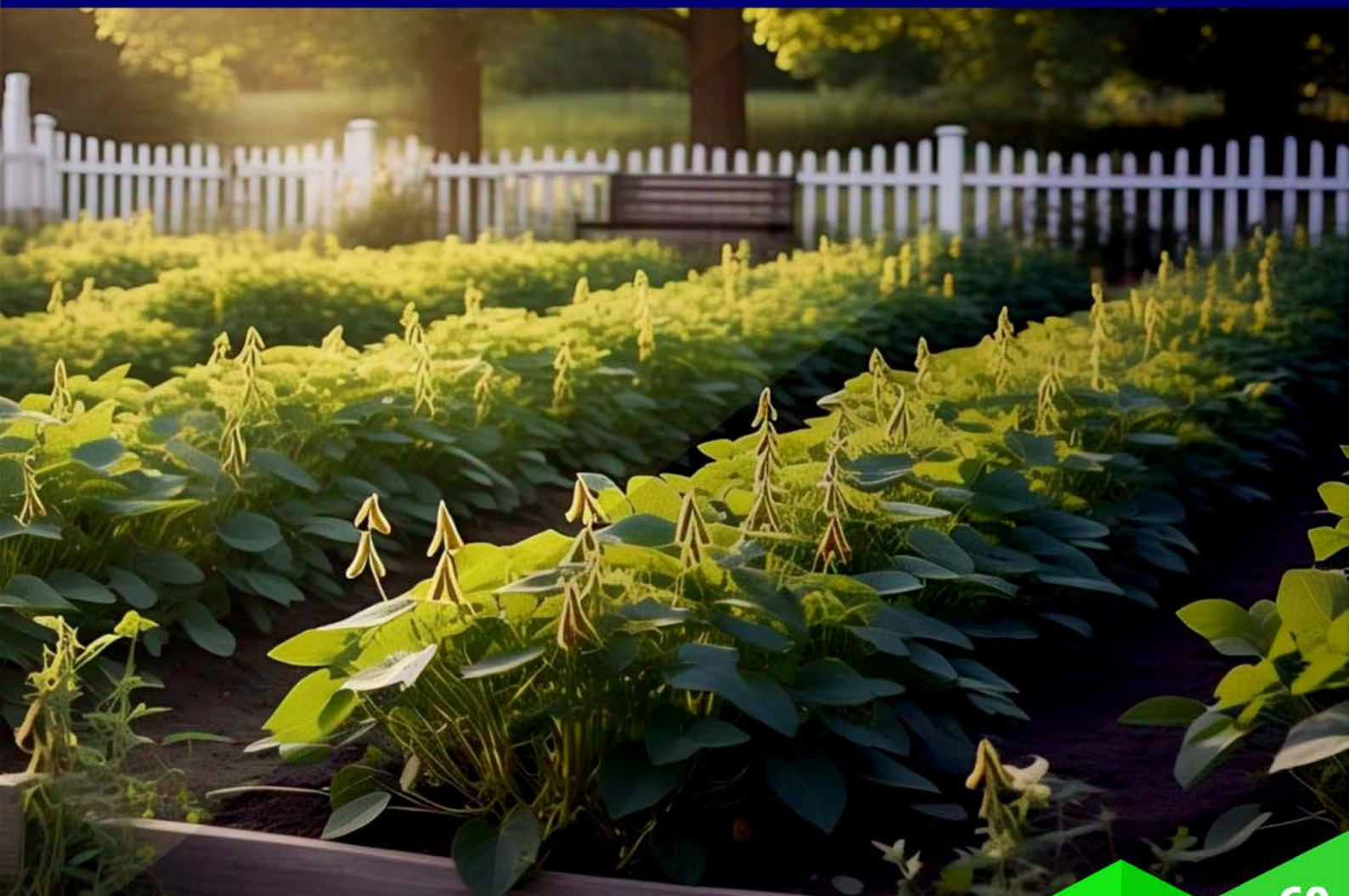
“Efektif tidaknya suatu penerapan metode diseminasi ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya adalah metode penerapan yang digunakan, hasil yang diperoleh dari penerapan metode, serta tantangan yang dilalui dalam pencapaian hasil. Perlu adanya kolaborasi antara berbagai pihak pemangku kepentingan baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi lainnya adalah sebuah kunci yang efektif dan tepat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian hasil sesuai tujuan yang diharapkan”

Kedelai merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Sebagai komoditas utama, kedelai tidak hanya berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pendapatan petani dan pembangunan wilayah. Peningkatan produksi dan pengembangan kawasan kedelai diarahkan melalui strategi peningkatan areal tanam, peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi produksi, perbaikan akses pasar, pengembangan insentif harga, pengembangan infrastruktur, penguatan kelembagaan dan permodalan. Upaya perbaikan komponen teknologi perlu dilakukan untuk peningkatan produksi kedelai, terutama terkait penggunaan varietas unggul baru (VUB) kedelai yang mempunyai umur genjah dan daya hasil tinggi, efisiensi penggunaan agroinput baik berupa tenaga kerja pada kegiatan penyiapan lahan (olah tanah), efisiensi ketersediaan air, maupun efisiensi penggunaan pupuk mengingat pada dua kali musim tanam padi umumnya petani memberikan pupuk dengan takaran yang relatif tinggi, sehingga efek residunya perlu diperhitungkan dalam budidaya tanaman kedelai. Namun, karena masih kurangnya pengetahuan petani terkait komponen teknologi tersebut menyebabkan para petani terbatas dalam mengakses informasi teknologi.

Beragamnya karakteristik dari tiap petani tersebut mengharuskan komponen inovasi teknologi kedelai yang dihasilkan perlu bersifat adaptif, mudah dicoba, terjangkau, tepat guna secara teknis, ekonomis serta diterima secara sosial. Pemahaman terhadap karakteristik inovasi teknologi dan para petani pengguna ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan bagaimana teknologi dan metode diseminasi yang tepat. Pemilihan metode diseminasi yang tepat dapat berfungsi sebagai jalur komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para petani pengguna terhadap teknologi yang disampaikan. Metode diseminasi memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, sehingga pemilihannya didasarkan pada tujuan diseminasi, jumlah sasaran, ketersediaan anggaran dan waktu pelaksanaan.

Penerapan metode diseminasi melalui penguatan korporasi petani menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya komoditas kedelai. Namun, banyak petani yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti akses terbatas terhadap teknologi, informasi pasar, praktik pertanian yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, adanya penguatan korporasi petani kedelai memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan ekonomi lokal dan menjadi krusial. Melalui kelembagaan petani yang kuat, petani dapat berbagi peran antar anggota, meningkatkan nilai daya tawar di pasar, dan mudah dalam mengakses informasi pelatihan serta teknologi yang diperlukan. Dalam konteks ini, adanya penerapan metode diseminasi yang efektif merupakan langkah yang strategis dan berpotensi membantu petani dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan kualitas kedelai yang mereka hasilkan, serta meningkatkan daya saing petani di pasar global.

Meskipun demikian, korporasi petani sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan mereka. Tantangan tersebut mencakup masalah dalam manajemen organisasi, keterbatasan akses ke pasar yang menguntungkan, serta kurangnya adopsi teknologi modern yang dapat meningkatkan produktivitas. Dalam menghadapi tantangan ini, metode diseminasi informasi menjadi salah satu strategi kunci untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas korporasi petani kedelai. Hal ini, sesuai dengan Limenih B (2018) yang menyatakan bahwa metode diseminasi inovasi yang dilakukan oleh penyuluh kepada petani lebih didominasi oleh kegiatan pelatihan, demonstrasi plot, dan diskusi dengan petani. Dalam konteks korporasi petani kedelai, penerapan metode diseminasi sangat penting untuk membantu petani mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan meningkatkan produktivitas mereka. Adapun beberapa metode diseminasi yang digunakan meliputi:



## WORKSHOP DAN PELATIHAN

Metode ini biasanya dilakukan dengan penyelenggaraan berupa sesi pelatihan dan workshop yang dirancang untuk memberikan pengetahuan teknis kepada para petani mengenai budidaya kedelai yang efisien dan efektif. Dalam pelatihan ini, para petani dapat belajar tentang praktik pertanian terbaik, pemeliharaan tanaman, penggunaan pupuk yang tepat, serta pengendalian hama dan penyakit. Dengan metode ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka, serta dapat menerapkan teknik yang lebih produktif di ladang mereka.

## PLATFORM DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL

Di era yang serba digital saat ini, peran media sosial dan platform digital lain menjadi alat yang sangat efektif untuk berinteraksi dan mendiseminasikan informasi. Petani dapat menggunakan berbagai saluran online, seperti grup Facebook, WhatsApp, dan aplikasi pertanian, untuk berbagi informasi dan pengalaman antar satu sama lain. Melalui medsos dan platform digital, petani dapat mengakses konten-konten edukatif tentang dunia pertanian, mengikuti tren realtime permintaan dan harga pasar, serta mendapatkan dukungan dari komunitas yang lebih luas. Hal ini, tidak hanya meningkatkan pengetahuan petani saja, tetapi juga dapat membangun jaringan sosial yang lebih luas bagi keberlangsungan usahatani mereka. Selain itu, dapat memberikan kesempatan kepada penyuluh dan petani untuk memperoleh informasi teknis dan ekonomis dengan cepat serta menggunakannya secara efektif dan efisien dalam mengambil keputusan (Destrian et al., 2018)

## PENDAMPINGAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

Metode ini, berfokus pada membangun hubungan langsung antara petani dan para ahli pertanian maupun penyuluh. Melalui metode pendampingan dan bimbingan teknis, petani akan mendapatkan akses dan dukungan teknis yang dibutuhkan dalam proses pertanian mereka. Ahli pertanian juga dapat memberikan arahan, melakukan kunjungan lapangan, dan membantu para petani dalam menyelesaikan masalah yang muncul di lahan pertaniannya. Adanya hubungan yang erat ini, memungkinkan bagi para petani untuk belajar secara langsung dan menerapkan maupun mencari solusi yang lebih efektif berdasarkan pengalaman para praktisi/ahli.

Melalui penerapan berbagai metode diseminasi tersebut, diharapkan korporasi petani kedelai dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para anggotanya, serta memperkuat kolaborasi dan inovasi di antara mereka. Selain itu, penerapan diseminasi informasi yang tepat juga dapat membantu petani dalam memperoleh pengetahuan mengenai praktik pertanian yang baik, akses pasar yang lebih luas, serta inovasi teknologi yang lebih relevan. Dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani, diharapkan korporasi petani kedelai dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan, serta berkontribusi lebih signifikan terhadap ketahanan pangan dan perekonomian lokal. Hasil studi, menunjukkan bahwa penerapan metode diseminasi yang tepat memiliki efektivitas dan dampak positif yang signifikan terhadap korporasi petani kedelai. Beberapa hasil yang diperoleh dari penerapan metode diseminasi meliputi:

## **PENGETAHUAN MENINGKAT**

Petani yang senantiasa mengikuti program pelatihan dan workshop biasanya akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam pengetahuan mereka mengenai praktik pertanian yang lebih baik. Misalnya, mereka belajar tentang teknik budidaya pertanian yang lebih efisien dan efektif, penggunaan pupuk yang tepat dan efektif, dan pengendalian hama yang efektif. Peningkatan pengetahuan ini, tidak hanya dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas hasil panennya, tetapi dapat juga memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para petani tentang pengelolaan manajemen sumberdaya dan keberlanjutan usahatannya.

## **AKSES PASAR YANG LEBIH BAIK**

Dengan adanya akses informasi yang mudah dan lebih baik, pemahaman tentang kebutuhan dan tren pasar, petani akan lebih mudah dan mampu untuk menjalin kemitraan yang lebih kuat dengan pembeli maupun pemasok. Mereka akan dapat memasarkan produk kedelai mereka dengan lebih cepat, efektif dan mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Selain itu, pengetahuan tentang permintaan pasar dapat memungkinkan para petani untuk menyesuaikan jumlah produksi mereka, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian akibat over produksi atau kurangnya permintaan.

## **PENGUATAN JARINGAN**

Penerapan metode diseminasi informasi juga dapat berperan dalam memperkuat jaringan antara petani, pemasok, dan konsumen. Adanya penguatan jaringan dan interaksi yang difasilitasi melalui pelatihan dan platform digital, petani dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan para pemangku kepentingan lainnya. Jaringan yang kuat ini tentu menjadi penting untuk keberlanjutan korporasi kedepan, karena memungkinkan ada pertukaran informasi yang lebih baik, berkolaborasi dalam praktik pertanian, serta dukungan dalam menghadapi tantangan bersama. Jaringan yang solid juga akan meningkatkan daya tawar petani di pasar.

Secara keseluruhan, efektivitas penerapan metode diseminasi tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan individu petani, tetapi juga dapat memperkuat struktur korporasi petani kedelai secara keseluruhan, menjadikannya lebih kuat dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan di sektor pertanian kedepannya. Meskipun penerapan metode diseminasi membawa banyak manfaat bagi petani, tetapi terdapat juga beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitasnya. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya:

## MINIMNYA SARANA DAN SUMBERDAYA

Banyak para petani, terutama yang berada di daerah terpencil menghadapi kendala dalam mengakses sumberdaya yang diperlukan untuk mengikuti pelatihan. Hal ini, mulai dari keterbatasan biaya transportasi, tidak tersedianya fasilitas pelatihan yang dekat lokasi mereka, serta masih kurangnya perangkat teknologi seperti smartphone atau komputer yang diperlukan untuk mengakses informasi digital. Tanpa adanya akses yang memadai tersebut, petani tidak dapat memanfaatkan peluang pembelajaran yang ditawarkan, yang pada gilirannya dapat menghambat peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka.

## TINGKAT PENDIDIKAN BERVARIASI

Perbedaan status dan tingkat pendidikan diantara petani dapat menjadi penghalang dalam penyampaian informasi yang efektif. Petani dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah mungkin akan kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan dalam pelatihan, terutama jika informasi tersebut disajikan dengan cara yang terlalu teknis. Rendahnya tingkat pendidikan petani tersebut menyebabkan kemampuan dalam mengolah informasi dan mengadopsi teknologi relatif sangat terbatas sehingga menghasilkan produk yang berkualitas rendah (Mulyandari et al. 2010). Selain itu, perbedaan dalam status dan tingkat pendidikan dapat menyebabkan ketidapkahaman terhadap praktik pertanian yang lebih modern, sehingga memengaruhi sejauh mana mereka dapat menerapkan pengetahuan baru dalam usahatani mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif untuk memastikan agar semua petani dapat mengikuti dan memahami materi yang diajarkan.



## RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN ATAU HAL BARU

Banyak petani yang memiliki kebiasaan dalam bertani menggunakan praktik tradisional, mereka enggan untuk mengubah metode bertaninya, meskipun diseminasi informasi menunjukkan adanya manfaat yang baik. Resistensi ini, bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk adanya ketidakpastian tentang efektivitas metode baru, kekhawatiran akan risiko yang mungkin timbul dari perubahan tersebut, atau sekadar kenyamanan dengan cara lama yang sudah mereka jalani. Adanya hal ini, dapat menyulitkan upaya untuk mengadopsi inovasi yang diperlukan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, pendekatan yang melibatkan komunikasi efektif, dukungan emosional, dan pembuktian akan manfaat yang nyata dari perubahan atau hal baru sangat penting untuk mengatasi resistensi ini.

Dengan memahami tantangan-tantangan tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan diseminasi informasi agar dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengatasi kendala dan mengoptimalkan dampak positif bagi korporasi petani kedelai. Selain itu, adanya dukungan dan penerapan metode diseminasi yang tepat dalam penguatan korporasi petani kedelai terbukti cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan jaringan antar petani. Oleh karena itu, adanya kolaborasi antara berbagai pihak pemangku kepentingan baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi lainnya adalah sebuah kunci yang efektif dan tepat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Dengan demikian, akan tercipta rasa kebersamaan yang kuat antar petani dengan berbagai pihak lain yang merupakan modal dasar keberhasilan dalam proses diseminasi informasi yang efektif, sehingga tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan jangka panjang bagi para petani kedelai di Indonesia (Nuryanti dan Swastika, 2011).

## DAFTAR BACAAN

- Destrian, O., Wahyudin, U., & Mulyana, S. (2018). Perilaku Pencarian Informasi Pertanian melalui Media Online pada Kelompok Petani Jahe. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 121–132.
- Limenih B. 2018. Agricultural knowledge, source and information system in Central Highland of Ethiopia. *JAgriExt Rural Dev.* [Internet]. [cited 2018 Feb 9]. 10(2): 28-34. Available from: <http://www.academicjournals>.
- Mulyandari RSH, Sumardjo, Pandjaitan NK, Lubis DP. 2010. Pola komunikasi dalam pengembangan modal manusia dan sosial pertanian. *Forum Penel Agro Ekon.* 28 (2) : 135 - 158.
- Nuryanti S, Swastika DKS. 2011. Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. *Forum Penel Agro Ekon.* 29 (2) : 115 - 128.



BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN